



Dampak Regulasi terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran



Australian Government



Judul:

Dampak Regulasi terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran

Penulis:

Puslitjak: Irsyad Zamjani, Lukman Solihin, Teguh Supriadi, Ihya Ulumuddin, Indah Pratiwi, Diyan Nur Rakhmah | **INOVASI:** Rasita Ekawati Purba, Senza Arsendy, Zainul Fadilah, Lanny Octavia, Basilius Bengoteku, Aos Hadiwijaya | **TASS:** Ingga Vistara, Tri Maulana

Penyelaras:

Muktiono Waspodo, Lukman Solihin, Rasita Ekawati Purba

Tata Letak:

Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Maret 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ABSTRAK

Regulasi dan kebijakan pemerintah telah berhasil meluaskan akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, namun belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Analisis yang dilakukan Bank Dunia mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia (Bank Dunia, 2018c), hasil PISA tahun 2000–2018 (Kurniawati dkk., 2018 dan Pusat Penilaian Pendidikan, 2018), serta survei kemampuan siswa kelas awal sekolah dasar (ACDP, 2014; Pusat Penilaian Pendidikan, 2016; dan INOVASI, 2018) menunjukkan mutu pembelajaran yang masih jauh tertinggal. Fakta ini menyisakan pertanyaan, apa yang salah dengan regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan sehingga belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran? Apa saja regulasi yang dianggap menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran? Bagaimana regulasi itu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran? Pertanyaan-pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa regulasi dan kebijakan merupakan hulu dari manajemen dan tata kelola yang baik dalam dunia pendidikan. Kajian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan mendasarkan pada temuan lapangan. Melalui pendekatan yang bersifat induktif ini, persoalan regulasi dan kebijakan dianalisis berdasarkan dampak yang dirasakan oleh para pemangku kebijakan di tingkat satuan pendidikan di beberapa daerah mitra dan non-mitra program INOVASI, antara lain Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Regulasi didalami guna memahami apakah terdapat persoalan yang bersifat inheren atau hanya bersifat penafsiran. Temuan persoalan dibatasi pada regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan dasar. Batasan tersebut mengarahkan kajian ini untuk fokus pada beberapa isu, yaitu kurikulum dan penilaian, pembelajaran dan guru, serta Biaya Operasional Sekolah (BOS). Melalui telaah terhadap tiga isu tersebut, kajian ini mengungkap adanya beberapa persoalan regulasi dan kebijakan. *Pertama*, kurikulum di kelas awal sekolah dasar tidak memberikan materi yang cukup untuk belajar membaca dan menulis permulaan. *Kedua*, beban kurikulum tambahan dan muatan lokal yang dianggap membebani proses pembelajaran. *Ketiga*, kriteria ketuntasan minimal (KKM) belum mengakomodasi keragaman dan keunikan siswa. *Keempat*, kebijakan di ranah pembelajaran bermasalah pada pendekatan taksonomi, RPP dan administrasi pembelajaran yang rumit, serta kebijakan jumlah rombel tidak mengakomodasi kemungkinan *multigrade*. *Kelima*, pada ranah guru, ketentuan bahwa guru harus “sehat jasmani dan rohani” dapat mendiskriminasi penyandang disabilitas, indikator kompetensi pedagogik dan profesional guru cenderung menggunakan pendekatan teoretis dan kurang memperhatikan penguasaan metode dan materi pembelajaran, penilaian guru cenderung tidak objektif dan mengarah pada pemenuhan administrasi, beban administrasi guru yang rumit baik yang terkait dengan pembelajaran (RPP, KKM, rapor manual dan *online*) maupun non-pembelajaran (administrasi kenaikan pangkat, Tunjangan Profesi Guru, serta tugas tambahan sebagai bendahara BOS). *Keenam*, petunjuk teknis (Juknis) BOS 2014 – 2019 disusun sebagai kebijakan yang reaktif, tambal sulam, terlampau rinci dan rumit, serta tidak berusaha menanggulangi inti masalah pendanaan pendidikan. Terkait berbagai temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan perlunya revisi, sinkronisasi, maupun sosialisasi pada sejumlah regulasi dan kebijakan pada setiap isu yang dibahas dalam kajian ini. Selain itu, terdapat beberapa isu yang kiranya perlu dikaji lebih jauh.

Kata kunci: regulasi pendidikan, kurikulum, beban administrasi guru, biaya operasional sekolah, mutu pembelajaran

KATA PENGANTAR

Adanya regulasi adalah salah satu bentuk upaya Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Idealnya berbagai regulasi dalam bidang pendidikan bersifat memfasilitasi atau memudahkan, bukan mengekang atau mempersulit. Akan tetapi, sementara pihak mengatakan bahwa minimnya inovasi dalam pembelajaran salah satunya justru muncul karena regulasi itu sendiri. Dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak akhir 2019, tidak boleh lagi ada regulasi yang menghambat kemerdekaan para pelaku pendidikan dalam berkreasi dan berinovasi.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) bekerja sama dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan *Technical Assistance for Education System Strengthening* (TASS) melakukan studi cepat Dampak Regulasi terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi apa saja regulasi yang dianggap menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran serta bagaimana regulasi itu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran.

Kajian ini membatasi pembahasan pada tiga isu utama, yaitu: kurikulum dan penilaian, tata kelola guru, dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kajian ini menemukan bahwa meskipun beberapa aspek dalam regulasi memang bermasalah, namun efektivitas implementasi regulasi juga terkait dengan kapasitas pemangku kepentingan di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan perlunya revisi, sinkronisasi, maupun sosialisasi pada sejumlah regulasi dan kebijakan pada setiap isu yang dibahas.

Karena memang merupakan kajian cepat, tidak semua aspek dari berbagai isu tersebut dapat ditelaah dalam kajian ini. Hal ini membuka ruang yang lebar untuk dapat diisi oleh penelitian-penelitian lain berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dari Puslitjak, INOVASI, dan TASS yang terlibat dalam kegiatan studi cepat ini. Kami berharap hasil dari kajian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk meninjau berbagai regulasi yang ada agar dapat mendukung pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.

Jakarta, 31 Maret 2020

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

Muktiono Waspodo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Rumusan Masalah.....	2
A.3. Metode.....	3
B. KURIKULUM, BEBAN MATA PELAJARAN, DAN KKM	4
B.1. Keselarasan Kurikulum PAUD dan SD Kelas Awal.....	4
B.2. Beban Mata Pelajaran	8
B.3. KKM sebagai Tolok Ukur Evaluasi Hasil Belajar	9
C. PERSOALAN SEPUTAR GURU DAN PEMBELAJARAN.....	13
C.1. Regulasi Terkait Guru dan Pembelajaran	14
C.2. Regulasi Terkait Kualifikasi dan Kompetensi Guru.....	16
C.3. Regulasi Terkait Beban Kerja Guru	19
D. PERSOALAN SEPUTAR BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	23
D.1. Perkembangan Juknis BOS 2015-2019.....	23
D.2. Komponen Penggunaan Dana BOS.....	25
E. KESIMPULAN DAN SARAN	35
DAFTAR PUSTAKA	41
Lampiran 2. Contoh RPP Sederhana	44
Lampiran 3. Instrumen Profil Belajar Siswa.....	52
Lampiran 4. Adaptasi Profil Belajar Siswa	62

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Indonesia memulai rangkaian reformasi kebijakan di bidang pendidikan sejak 2002. Hal itu ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan—terutama pendidikan dasar, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN. Tahun berikutnya terbit UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), desentralisasi kewenangan pendidikan dengan pemerintah daerah, serta manajemen berbasis sekolah. Kecuali itu, standardisasi dan penguatan kompetensi guru juga mulai diatur melalui UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Berkat berbagai regulasi dan kebijakan tersebut, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat. Pada 1950, warga Indonesia berusia 25 tahun ke atas memiliki lama sekolah kurang dari 2 tahun. Angka itu meningkat menjadi 4 tahun pada 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 tahun pada 2015 (World Bank, 2018c).

Sayangnya, peningkatan akses terhadap pendidikan belum diikuti oleh pemerataan peningkatan kualitas hasil pembelajaran. Berbagai regulasi dan kebijakan mengenai pendidikan pascareformasi yang menghasilkan sokongan anggaran yang cukup besar, standardisasi kompetensi guru, perbaikan tunjangan kesejahteraan guru, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan berbagai kebijakan lainnya, ternyata belum mampu menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik.

Hal itu terutama apabila dilihat dari capaian hasil Programme for International Student Assessment (PISA) dari tahun 2000 hingga 2015 (Kurniawati, Suryadarma, Bima, dan Yusrina, 2018). Begitu pula hasil PISA 2018 mencerminkan kesimpulan serupa: tingkat partisipasi pendidikan meningkat, namun capaian hasil pembelajaran relatif stagnan. Dari data yang diolah dari hasil PISA 2018 terungkap, sejak 2000 hingga 2018, Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal perluasan akses pendidikan. Hal itu terlihat dari meningkatnya angka partisipasi siswa bersekolah dalam survei PISA, dari 39% di tahun 2000 menjadi 85% pada 2018 (Pusat Penilaian Pendidikan, 2018). Namun, perkembangan pesat di bidang akses pendidikan, belum diikuti performa yang baik dari sisi mutu pembelajaran. Padahal menurut Hanushek dan Woessmann (2011), peningkatan poin yang signifikan dalam tes PISA dalam waktu jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mutu pendidikan menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian karena terkait dengan daya saing suatu bangsa (Sahlberg, 2006; World Bank, 2018b).

Buruknya performa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sistem yang melingkupinya. Regulasi dan kebijakan yang ada selama ini telah mendorong perluasan akses pendidikan, namun belum mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, upaya menelaah persoalan mutu pendidikan perlu dimulai dengan melihat hambatan-hambatan yang mungkin terjadi akibat suatu regulasi atau kebijakan, serta manajemen dan tata kelola yang ada.

Dalam laporan bertajuk *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*, Bank Dunia menengarai setidaknya empat faktor yang membuat peserta didik di banyak negara berkembang gagal mengikuti proses pembelajaran yang berkualitas, yaitu: (1) minimnya kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik karena kurangnya nutrisi sejak masa kanak-kanak, minimnya kondisi kesejahteraan keluarga, maupun kurangnya kemampuan literasi dasar; (2) kurangnya kompetensi dan motivasi guru dalam mengajar; (3)

minimnya sumber daya belajar; dan (4) manajemen dan tata kelola pendidikan yang buruk (World Bank, 2018a). Tiga yang pertama berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, sementara yang terakhir berdampak tidak langsung, namun sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya pembelajaran secara efektif.

Pada faktor keempat di atas, kedudukan regulasi menjadi penting, yakni menciptakan kondisi manajemen dan tata kelola yang baik. Namun demikian, berbagai regulasi yang ada sebagai cerminan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pada 2012, *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menerbitkan Laporan Kajian mengenai Reformasi Regulasi Indonesia, yang mana salah satu temuannya menyatakan bahwa kelemahan regulasi di Indonesia di antaranya tidak memiliki pendekatan menyeluruh dalam pembenahan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan substansi regulasi tidak menyentuh akar permasalahan dan sering kali bersifat tumpang tindih (OECD, 2012).

Begitu pula dalam dunia pendidikan, regulasi yang ada tidak selalu mendorong pada perbaikan sistem dan tata kelola yang baik, melainkan juga ditengarai menciptakan hambatan-hambatan teknis dalam pengembangan pembelajaran. Dalam hal mendorong kompetensi, kreativitas, dan motivasi guru misalnya, pemerintah justru terkesan menciptakan berbagai batasan dengan mengendalikan ruang-ruang kreativitas guru melalui berbagai aturan/regulasi yang ketat dan kaku (Horn, 2011). Praktik ini umumnya terjadi di sekolah-sekolah negeri yang dijalankan berdasarkan kurikulum nasional dan aturan operasional pendidikan yang mengikat guru, kepala sekolah, siswa, dan aktor lainnya. Hal inilah yang memunculkan saran tentang pentingnya mengurangi regulasi dalam pengaturan sekolah-sekolah negeri selayaknya yang selama ini dijalankan di sekolah-sekolah swasta (Horn, 2011).

Pengalaman dalam berbagai praktik pembelajaran menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia memosisikan guru di posisi terbawah yang hanya menerima kebijakan dan instruksi dari pusat. Padahal seharusnya guru diposisikan sebagai sumber inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran sehingga yang perlu dijawab adalah apa yang perlu dilakukan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mendukung guru (Shihab dkk., 2018). Regulasi yang kaku, menjadi penghambat dalam menciptakan guru yang kreatif karena menyebabkan guru menjadi serba takut dan ragu untuk melakukan hal-hal baru diluar kebiasaan (Baedowi, 2015). Oleh karenanya, pemerintah perlu memberikan lebih banyak keleluasaan dalam bentuk otonomi sekolah, tanpa khawatir kebebasan tersebut merusak tatanan sistem yang ada, selama guru dan sekolah bertanggung jawab terhadap otonomi yang diberikan tersebut. Pemerintah perlu memberikan keleluasaan lebih kepada guru dan sekolah untuk lebih banyak membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung terbangunnya otonomi dan demokrasi dalam pendidikan (Gray, 2011).

A.2. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan pentingnya upaya mengkaji regulasi yang dapat memengaruhi tata kelola pendidikan dan berdampak pada mutu dan inovasi pembelajaran. Titik tekan kajian ini difokuskan pada ada tidaknya hambatan yang berhulu pada regulasi atau kebijakan tertentu yang berdampak pada kinerja mutu pembelajaran. Dalam rangka mengkaji aspek regulasi tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan: (a) apa saja regulasi yang dianggap menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran?; dan (b) bagaimana regulasi tersebut berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran?

Permasalahan penelitian di atas berangkat dari asumsi bahwa regulasi dan kebijakan merupakan hulu dari manajemen dan tata kelola yang baik dalam dunia pendidikan. Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan

induktif, dalam makna proses analisis terhadap regulasi yang dianggap memengaruhi pembelajaran dilakukan berdasarkan temuan lapangan. Masalah regulasi ditelaah setelah mendalami persoalan yang dihadapi guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan lainnya.

A.3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, Focus Group Discussion, dan kajian literatur. Data lapangan dikumpulkan dari beberapa lokasi penelitian yang merupakan mitra dari program INOVASI, antara lain Jawa Timur (Kab. Sidoarjo dan Kab. Pasuruan), Kalimantan Utara (Kab. Bulungan), dan Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara). Selain dari daerah mitra, data juga diperoleh dari dua daerah non-mitra INOVASI, yaitu Kota Mataram dan Kota Kupang. Dalam proses pengumpulan data lapangan, tim melakukan serangkaian wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), akademisi di bidang pendidikan, serta pejabat pada dinas pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota) setempat. Fokus persoalan dibatasi pada regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan dasar.

Temuan lapangan banyak menyoroti berbagai persoalan yang dianggap menghambat proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif. Berbagai temuan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: (1) persoalan di sekitar kurikulum pembelajaran, seperti keselarasan antara kurikulum PAUD dan SD, kriteria ketuntasan minimal (KKM), penilaian rapor siswa, serta beban muatan tambahan dan muatan lokal; (2) masalah pada penjaminan mutu pendidikan terutama isu instrumen akreditasi sekolah yang rumit dan bersifat administratif; (3) persoalan pendanaan pendidikan, seperti persoalan seputar keterlambatan dana BOS, alokasi dana BOS belum sepenuhnya mendukung mutu pembelajaran, bendahara BOS harus PNS sehingga mengganggu kinerja guru, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak dapat diakses oleh sekolah yang tidak memiliki sertifikat lahan; serta (4) masalah yang dihadapi pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain terkait dengan beban kerja dan beban administrasi guru, kesenjangan kompetensi guru dalam mengajar, rekrutmen dan penetapan kepala sekolah, serta kondisi pengawas yang belum seluruhnya kompeten.

Temuan-temuan itu lantas didiskusikan dengan pemangku kebijakan di lingkungan Kemdikbud. Hasil diskusi mengerucutkan analisis pada tiga topik penting untuk didalami dalam laporan ini. *Pertama*, masalah di sekitar kurikulum pembelajaran, antara lain mengenai keselarasan antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal, beban muatan tambahan dan muatan lokal, serta kriteria ketuntasan minimal (KKM). *Kedua*, persoalan seputar regulasi yang berkenaan dengan guru. *Ketiga*, telaah terhadap petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Berikut ini akan disajikan hasil analisis dari ketiga topik tersebut secara berurutan.

B. KURIKULUM, BEBAN MATA PELAJARAN, DAN KKM

Kurikulum merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, karena kurikulum merupakan panduan dan rujukan dalam merencanakan materi pembelajaran. Bagian ini membahas beberapa isu terkait dengan kurikulum yang meliputi keselarasan antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal, beban kurikulum, serta kriteria ketuntasan minimal (KKM). Tiga isu ini dibahas berdasarkan persoalan yang mencuat dari temuan lapangan.

B.1. Keselarasan Kurikulum PAUD dan SD Kelas Awal

Salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh guru SD kelas awal (kelas 1, 2, dan 3) adalah minimnya kemampuan membaca siswa di kelas awal. Guru kelas awal mengeluhkan, di satu sisi mereka harus menuntaskan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum, namun di sisi lain sebagian siswa belum siap belajar karena belum mampu baca-tulis.

Keluhan ini bukan tanpa dasar. Hasil *Early Grade Reading Assessment* (EGRA) yang untuk mengukur kemampuan membaca siswa di kelas awal yang dilakukan di 7 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa siswa kelas 2 dan 3 umumnya dapat membaca kata dalam Bahasa Indonesia, namun tidak paham maknanya. Hasil EGRA ini juga menunjukkan, siswa di Jawa dan Bali dapat membaca dan memahami lebih baik dibandingkan siswa di daerah lain. Sementara siswa dari daerah timur Indonesia membaca dengan tingkat pemahaman paling rendah (ACDP, Lembar Kerja Desember 2014). Hasil studi terkini dari INOVASI (2018) juga menunjukkan temuan serupa, yakni masih ada siswa di kelas 1 - 3 SD yang belum mampu membaca. Bahkan di beberapa sekolah, studi ini juga menemukan bahwa ada siswa kelas 3 yang belum lancar membaca kata. Secara umum, siswa dari daerah Timur Indonesia lebih rentan untuk tidak mampu membaca dibandingkan mereka yang ada di Jawa (INOVASI, 2018). Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) pada 2016 juga menunjukkan bahwa 47% siswa di kelas 4 SD belum mampu membaca secara mandiri (Pusat Penilaian Pendidikan, 2016).

Kemampuan membaca merupakan modal awal guna mengakses materi pelajaran selanjutnya. Peserta didik yang tidak mampu membaca di kelas awal memiliki kemungkinan lebih kecil menyelesaikan pendidikan dasar (Hernandez, 2011), karena siswa dapat mengalami “efek Matthew”, yaitu dampak bagi siswa yang tidak bisa membaca akan kehilangan motivasi, hanya mampu menyerap sedikit informasi, serta tidak mampu memahami informasi yang lebih kompleks (Stanovich, 1986). Hasil survei akhir INOVASI terhadap siswa di daerah mitra mengungkapkan bahwa siswa yang tidak menguasai literasi dasar (mengetahui huruf, suku kata, dan kata) pada saat survei awal, memiliki skor tes pemahaman yang lebih rendah dibandingkan siswa yang telah menguasai literasi dasar sejak awal. Ketertinggalan ini cenderung persisten yang ditunjukkan dengan kesenjangan nilai tes pemahaman yang semakin melebar seiring dengan peningkatan jenjang kelas (INOVASI, 2019).

Pada dasarnya, calon peserta didik yang akan masuk ke jenjang kelas 1 SD tidak diwajibkan memiliki kemampuan membaca sebagaimana diatur oleh Permendikbud 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam Permendikbud 51/2018, pada Pasal 24 angka (5) disebutkan secara tegas bahwa “Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung”.

Ketentuan tersebut selaras dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang menjadi acuan kurikulum PAUD sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD dan Permendikbud 146/2014 tentang Kurikulum 2013 untuk PAUD. Mengacu pada Permendikbud 137/2014, pada lampiran

mengenai Standar Isi (hlm 27-28) dijabarkan perihal lingkup perkembangan bahasa, khususnya pada sub-keaksaraan, untuk anak usia 5 – 6 tahun sebagai berikut:

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal;
2. mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya;
3. menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama;
4. memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf;
5. membaca nama sendiri;
6. menuliskan nama sendiri; dan
7. memahami arti kata dalam cerita.

Dari lingkup perkembangan anak di atas, jelas bahwa kompetensi keterampilan yang perlu dicapai oleh peserta didik selepas menempuh pendidikan PAUD adalah mampu menyebutkan simbol huruf, mengenal bunyi huruf, serta membaca dan menulis nama sendiri. Ketentuan dalam Standar Nasional PAUD tersebut selanjutnya dipertegas dalam kurikulum PAUD, yang mana untuk kompetensi “Memahami bahasa reseptif (menyimak dan membaca)”, maka di usia 6 tahun yang merupakan usia akhir masa PAUD, anak diharapkan dapat menceritakan kembali apa yang didengar dengan kosakata yang lebih (Lampiran 1 Permendikbud 146/2014, hlm 30). Dari dua Permendikbud yang mengatur kurikulum dan capaian kompetensi siswa PAUD tersebut, menjadi jelas bahwa peserta didik yang telah menempuh pendidikan di jenjang PAUD tidak diharapkan memiliki kompetensi mampu membaca.

Namun demikian, ketika peserta didik mulai mengikuti pembelajaran di kelas 1 SD, mereka akan segera mendapati materi buku tematik dengan ragam materi bacaan, gambar, serta panduan melakukan berbagai aktivitas. Berbagai materi pembelajaran tersebut hanya mungkin dipelajari dengan baik apabila siswa telah memiliki kemampuan membaca. Selain itu, buku tematik tersebut juga kurang memberikan ruang bagi materi-materi belajar membaca permulaan. Dengan kata lain, di dalam buku teks siswa, tidak ada materi khusus yang sistematis untuk pembelajaran membaca permulaan. Akibatnya, sebagian besar guru yang menyandarkan proses pembelajaran hanya pada buku teks yang disediakan oleh pemerintah, tidak dapat memberikan layanan pembelajaran permulaan yang memadai kepada siswa.

Buku tematik sendiri merupakan ejawantah dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagaimana diatur oleh Permendikbud No. 37/2018 tentang KI dan KD pada Kurikulum 2013. Mengacu pada Permendikbud No. 37/2018 tersebut, berikut ini kami kutipkan KI dan KD bahasa Indonesia SD kelas 1, khususnya Kompetensi Keterampilan (4) yang memberikan gambaran perihal kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengenyam pendidikan di kelas 1 (**cetak tebal dari peneliti**).

Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
Kompetensi Dasar
4.1 Mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan (duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan benar
4.2 Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, gerakan tangan atas-bawah, kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan dengan gerakan menulis di udara/pasir/meja, melemaskan jari dengan mewarnai,

menjiplak, menggambar, membuat garis tegak, miring, lurus, dan lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf di tempat bercahaya terang) dengan benar
4.3 Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah
4.4 Menyampaikan penjelasan (berupa gambar dan tulisan) tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah secara lisan dan/atau tulis
4.5 Mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata Bahasa Indonesia yang tepat dan dibantu dengan bahasa daerah
4.6 Menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam teks tulis sederhana
4.7 Menyampaikan penjelasan dengan kosakata Bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar
4.8 mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis
4.9 Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk pengenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis
4.10 Menggunakan kosakata yang tepat dalam percakapan tentang hubungan kekeluargaan dengan menggunakan bantuan gambar/bagan silsilah keluarga
4.11 Meliskan puisi anak atau syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) sebagai bentuk ungkapan diri

Mencermati KI dan KD untuk SD kelas 1 di atas, maka dapat dipahami bahwa selepas menempuh pendidikan di kelas 1 peserta didik diharapkan mampu membaca dan menulis sederhana. Kemampuan membaca dan menulis sederhana itu dicapai melalui beberapa kompetensi keterampilan, antara lain mampu melafalkan bunyi vokal dan konsonan, melafalkan kosakata, dan menggunakan kosakata baik melalui lisan maupun tulisan.

Namun demikian, apabila menelaah lebih jauh buku teks siswa, maka tampak bahwa materi dan teks yang disodorkan mengandaikan peserta didik telah mampu membaca ketika mereka mengikuti pembelajaran di kelas 1 SD. Studi lebih awal yang dilakukan ACDP (2016) juga menunjukkan bahwa buku teks kelas awal memiliki terlalu banyak konten dengan bahasa yang kompleks. Padahal idealnya buku siswa dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri maupun dengan pendampingan guru maupun orang tua. Di dalam buku siswa, terdapat berbagai aktivitas, seperti *Ayo mengamati*, *Ayo membaca*, *Ayo mencoba*, *Ayo berlatih*, *Ayo berkreasi*, *Ayo bernyanyi*, *Ayo menari*, *Ayo bermain peran*, *Ayo berdiskusi*, *Ayo bercerita*, dan *Ayo menulis* yang sulit dilakukan apabila peserta didik tidak mampu membaca

Selain itu, di dalam buku siswa kelas 1 tidak terdapat bagian atau materi khusus untuk belajar membaca dan menulis permulaan. Materi belajar membaca dan menulis permulaan hanya terdapat pada beberapa bagian buku, tanpa struktur dan tahapan pembelajaran yang sistematis dan jelas. Lazimnya, tahapan belajar membaca diawali dengan (1) pengenalan huruf vokal dan konsonan, (2) bunyi huruf, (3) suku kata, (4) kata, dan (5) kalimat. Seharusnya pembelajaran membaca dan menulis permulaan diajarkan di awal periode pembelajaran sebagai bekal kompetensi siswa dalam mengakses pembelajaran. Hal itu karena asumsinya

calon peserta didik kelas 1 belum memiliki kemampuan membaca. Temuan ini masih konsisten dengan temuan kajian cepat ACDP (2016, 2017) yang secara rinci mengulas KI3.

Buku tematik pegangan siswa yang menjadi panduan belajar akhirnya menyulitkan guru. Guru merasa terbebani antara merampungkan materi pembelajaran sesuai buku tematik padahal kondisi sebagian peserta didik belum mampu membaca, atau fokus untuk memberikan materi pembelajaran membaca permulaan yang minim petunjuk dalam buku teks. Jalan keluar yang ditempuh oleh guru, salah satunya ialah mengajarkan membaca dan menulis permulaan pada tiga bulan pertama. Materi untuk belajar membaca dan menulis permulaan itu juga tidak memanfaatkan buku tematik, melainkan menggunakan buku belajar membaca dan menulis yang beredar di pasaran.

Tidak adanya materi khusus untuk proses belajar membaca permulaan dalam buku tematik SD kelas 1 boleh jadi dikarenakan penafsiran terhadap KD yang kurang tepat oleh penulis buku tematik. Di dalam KD, secara implisit sebetulnya telah disebutkan tahapan belajar membaca yang perlu dicapai oleh peserta didik, yaitu mulai dari (1) melafalkan bunyi vokal dan konsonan; (2) menggunakan kosakata; (3) dan menjelaskan menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Hanya saja, karena disebutkan secara terpisah-pisah dan tidak berurutan (sekuensial), maka penyusun buku tematik lebih fokus pada tema tertentu, misalnya materi mengenai pengenalan diri, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Sementara itu, KD yang secara eksplisit menyebutkan mengenai **persiapan praktik membaca dan menulis permulaan** justru tidak mendapat ruang yang memadai di dalam buku teks. Hal ini sejalan dengan temuan studi ACDP (2017) terkait risiko penyusunan materi ajar sebagai topik, di mana kurikulum tidak memperhatikan konsep-konsep penting yang membentuk dasar pemahaman untuk pembelajaran selanjutnya. Guru juga tidak punya acuan mengenai kapan ia harus mengajarkan keterampilan dan strategi spesifik di suatu mata pelajaran agar siswa dapat berkembang menguasai keterampilan yang lebih kompleks dan sulit.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakselarasan antara kurikulum PAUD dan kelas awal SD terletak pada buku teks yang tidak mengakomodasi perlunya pembelajaran membaca permulaan di awal periode pembelajaran di kelas 1 SD. Hal itu berkaitan dengan tidak disebutkannya secara eksplisit di dalam KD pada jenjang Kelas 1 SD bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan membaca permulaan. Sementara itu, temuan lapangan menunjukkan bahwa buku teks sering kali menjadi sumber utama atau satu-satunya rujukan guru dalam menerapkan kurikulum.

Selain isi buku teks, yang juga menjadi masalah di kelas awal adalah terbatasnya ketersediaan buku bacaan berjenjang yang baik dan menarik minat siswa. Buku bacaan berjenjang merupakan sarana pendukung pembelajaran yang penting untuk meningkatkan kemampuan dan minat baca siswa di kelas awal. Studi terbatas terkait ketersediaan buku di 20 sekolah mitra INOVASI di Kabupaten Malinau dan Bulungan menunjukkan sangat terbatasnya buku bacaan siswa kelas awal. Dari sekitar 12.000 buku perpustakaan sekolah, hanya sekitar 3% yang sesuai untuk siswa kelas awal (INOVASI, 2019).

Mencermati persoalan di atas, maka rekomendasi yang dapat diajukan ialah: (a) perlu menyebutkan secara jelas dan tegas di dalam rincian KD bahwa pembelajaran membaca dan menulis permulaan merupakan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik kelas 1 SD, sehingga dapat digunakan sebagai acuan penulisan buku tematik;¹ sebagai kelanjutan dari rekomendasi yang pertama, maka (b) perlu memasukkan materi belajar membaca dan menulis

¹ Studi ACDP (2016, 2017) yang mengkaji kurikulum 2013 dan buku teks juga merekomendasikan perlunya peninjauan kurikulum secara teratur, yang dimulai secara bertahap dengan membenahi terlebih dahulu kurikulum kelas awal yang merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan belajar di tahap selanjutnya. Dengan demikian kurikulum akan dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan guru dan siswa.

permulaan di dalam buku teks secara terstruktur dan sistematis sesuai tahapan pembelajaran membaca dan menulis; selain itu, (c) perlu juga mendorong tersedianya buku bacaan berjenjang yang dibutuhkan siswa di kelas awal, salah satunya melalui dana BOS (lihat bagian “Persoalan Seputar Biaya Operasional Sekolah” dalam laporan ini).

B.2. Beban Mata Pelajaran

Terdapat dua persoalan terkait dengan beban mata pelajaran yang ditemukan di lapangan, yaitu: *pertama*, sekolah merasa terbebani karena harus memasukkan muatan tambahan, seperti adiwiyata, antikorupsi, sekolah sehat, dan lain-lain ke dalam kurikulum; *kedua*, terdapat tambahan muatan lokal yang merupakan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Tambahan muatan di luar mata pelajaran yang bersifat nasional maupun lokal merupakan tantangan tersendiri di tengah meluasnya anggapan bahwa beban mata pelajaran yang harus dipikul oleh peserta didik sejauh ini sudah berat. Hal itu menjadi sorotan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam wawancara menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2019 lalu. Pramono Anung menyarankan agar mata pelajaran tidak terlalu banyak (*overload*) agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya (<https://jpp.go.id>).

Muatan yang bersifat nasional seperti program adiwiyata, antikorupsi, sekolah sehat, dan lain-lain merupakan program nasional yang menjadi bagian dari program kementerian terkait dan perlu disukseskan melalui berbagai jalur, salah satunya jalur pendidikan. Namun demikian, program ini tidak dapat dijadikan mata pelajaran baru mengingat ketentuan mata pelajaran di SD dan SMP telah diatur dalam Permendikbud 57/2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Permendikbud 35/2018 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Se jauh ini, regulasi yang mengatur secara khusus muatan tambahan ini belum ada. Namun demikian, muatan tambahan tersebut dapat mengacu kepada panduan diversifikasi kurikulum yang sudah ada, meskipun panduan tersebut belum diformalkan dalam sebuah regulasi yang utuh.

Selain persoalan di atas, terdapat beban kurikulum lainnya, yaitu muatan lokal (mulok). Setidaknya terdapat dua regulasi yang mengatur mulok, yaitu Permendikbud 79/2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 dan UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bab Lampiran). Terdapat perbedaan mengenai ketentuan kewenangan penetapan muatan lokal di dua peraturan tersebut. Jika pada Permendikbud 79/2014, usulan muatan lokal di seluruh jenjang pendidikan adalah kewenangan sepenuhnya pemerintah kabupaten/kota, maka di UU 23/2014 (Bab Lampiran) penetapan kurikulum muatan lokal bergantung kepada jenjang pendidikannya (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Regulasi Tentang Muatan Lokal

Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013	Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 7 (1) Satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan hasil analisis konteks dan identifikasi muatan lokal kepada pemerintah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi urusan pemerintah provinsi
Pasal 7 (3)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan

<p>Pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.</p> <p>Pasal 7 (4) Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan hasil penetapan muatan lokal kepada pemerintah provinsi.</p> <p>Pasal 7 (5) Pemerintah provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya.</p>	<p>anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.</p>
---	---

Tabel di atas memperlihatkan perbedaan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan mulok. Permendikbud 79/2014 menyatakan bahwa mulok diusulkan dan ditetapkan secara berjenjang. Sekolah dapat mengusulkan mulok kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan dan diberlakukan di tingkat kabupaten/kota. Mulok yang telah ditetapkan tersebut dapat diusulkan ke pemerintah provinsi untuk ditetapkan dan diberlakukan di wilayah provinsi tersebut. Sementara UU 23/2014 mendasarkan penetapan mulok pada perbedaan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, yang mana pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan muatan lokal di jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, sementara pemerintah provinsi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Melihat adanya pertentangan ini, maka perlu penyelarasan antara Permendikbud 79/2014, khususnya Pasal 7 dengan Lampiran UU 23/2014.

Telaah kajian ini terhadap muatan tambahan dan mulok yang dianggap membebani sekolah menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak cukup beralasan. Hal itu karena sekolah dapat mengintegrasikan keduanya ke dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk dapat mengakomodasi dua muatan tersebut dalam pembelajaran. *Pertama*, mengintegrasikan muatan tambahan dan mulok ke dalam pembelajaran (intrakurikuler). Implikasinya, guru harus cermat dalam melakukan bedah KD untuk memastikan muatan yang dapat terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. *Kedua*, muatan tambahan dan mulok dapat menjadi bagian dari ekstrakurikuler, misalnya menjadi bagian dari kegiatan kepramukaan yang wajib dilaksanakan oleh sekolah (Permendikbud 63/2014 tentang Pendidikan Kepramukaan). *Ketiga*, mulok menjadi mata pelajaran tersendiri, namun konsekuensinya pemerintah daerah harus menyediakan sumber daya khusus. Selain itu, terdapat persoalan lain jika mulok menjadi mata pelajaran tersendiri, yaitu terkait dengan data Dapodik yang belum sepenuhnya mengakomodasi mulok sehingga berpengaruh terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG). Berangkat dari analisis tersebut, maka perlu adanya sosialisasi kebijakan agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat memahami strategi yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi muatan tambahan dan mulok agar tidak membebani sekolah.

B.3. KKM sebagai Tolok Ukur Evaluasi Hasil Belajar

Tahapan akhir dari proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi belajar kepada setiap peserta didik. Demi menjaga kualitas pembelajaran, pemerintah menetapkan sistem

penilaian berbasis kompetensi yang disebut dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM merupakan suatu acuan penentu seorang peserta didik memenuhi kriteria persyaratan penguasaan materi pelajaran tertentu secara minimal. Seperti tersebut dalam Permendikbud 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud 23/2016, unsur pembentuk KKM terdiri atas tiga komponen, yaitu *intake*, kompleksitas materi, dan daya dukung. *Intake* merupakan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik pada tingkat sebelumnya. Sementara kompleksitas materi merupakan tingkat kesulitan materi pada setiap indikator. Semakin tinggi kompleksitasnya, maka semakin tinggi skor yang dipakai. Terakhir, daya dukung, yaitu kondisi satuan pendidikan meliputi kompetensi pendidik, jumlah peserta didik dalam satu kelas, akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana dan prasarana. Ketiga komponen ini menjadi dasar penentuan KKM yang kemudian digunakan sebagai indikator minimal penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu. Melalui mekanisme KKM, kurikulum akan dianggap berhasil jika peserta didik mencapai atau melampaui KKM. Untuk menjamin pemenuhan KKM, pemerintah mengatur setiap satuan pendidikan untuk melakukan remedi bagi setiap peserta didik yang tidak memenuhi kompetensi (Permendikbud 23/2016, Pasal 9 huruf e).

Dalam praktiknya, implementasi KKM menghadapi sejumlah permasalahan. Hasil FGD yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara menunjukkan setidaknya terdapat permasalahan yang secara serentak ditemukan di seluruh wilayah sampel, yaitu hanya sedikit peserta didik yang mampu melampaui nilai yang ditetapkan oleh KKM meskipun telah melalui proses remedi. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi guru untuk “mengontrol” nilai peserta didik. Guru menyampaikan adanya tekanan untuk memberikan nilai semu; demikian juga kepala sekolah menyatakan hal yang sama. Penilaian kemampuan siswa yang merupakan ranah pendidikan menjadi bergeser pada ranah politik, yang pada akhirnya merugikan siswa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menemukan setidaknya ada tiga hal yang menjadi akar masalah, yaitu: a) unsur pembentuk KKM; b) persepsi remedi; dan c) KKM sebagai unsur dalam materi akreditasi sekolah. Untuk memahami permasalahan-permasalahan tersebut, kami berupaya menguraikan satu persatu akar permasalahan tersebut.

Unsur Pembentuk KKM

Telah disebutkan sebelumnya bahwa unsur pembentuk KKM terdiri dari *intake*, kompleksitas mata pelajaran, dan daya dukung. Unsur-unsur tersebut dianggap sebagai komponen penting dalam keberhasilan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan, sehingga masing-masing komponen dianggap memiliki bobot yang sama dalam menentukan kualitas pembelajaran. Sayangnya belum ada kajian lebih lanjut tentang unsur-unsur pembentuk KKM ini. Kritik yang mengemuka adalah apakah sejauh ini KKM sudah memperhatikan keunikan potensi setiap individu (peserta didik)?

Pada pertanyaan tersebut, diperlukan adanya perubahan *mindset* dalam kurikulum tentang pemberian ruang kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jika kurikulum masih mewajibkan setiap anak untuk menguasai seluruh mata pelajaran, potensi masing-masing anak tidak akan optimal. Sementara untuk penguasaan minimal, selain perlu dilakukan kajian mendalam, kami merekomendasikan tiga alternatif yaitu, (1) mengukur potensi masing-masing peserta didik sebelum dan sesudah proses pembelajaran sehingga setiap anak dilihat peningkatan capaian belajarnya dengan dirinya sendiri, bukan dengan standar sekolah; (2) mengembalikan pengukuran nilai pada KD pada tingkat SD, dan terakhir

yaitu dengan menggunakan sistem *cut of score based on participant*. Pengukuran dengan *cut of score based on participant* merupakan alat ukur yang didasarkan pada peserta didik. Cara menghitungnya, yaitu dengan mengukur angka rata-rata peserta didik yang masuk tanpa mempertimbangkan komponen penunjang lainnya. Namun, menggunakan metode ini diperlukan juga pengukuran yang matang berdasarkan pertimbangan para ahli pada setiap bidang mata pelajaran (Zieky dan Perie, 2006).

Permendikbud 16/2007 sebetulnya telah menyebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogi yang mencakup penguasaan pemetaan kompetensi peserta didik dari berbagai aspek, seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Secara normatif, aturan ini tidak bermasalah. Namun demikian, pemetaan kompetensi siswa yang meliputi banyak aspek, ditambah dengan ketiadaan instrumen untuk membantu guru melakukan tugas ini, menjadikan konsep ini belum bisa diterapkan. Mempertimbangkan hal ini, maka perlu dilakukan tinjauan kembali mengenai ruang lingkup dari tugas guru dalam melakukan pemetaan kemampuan siswa dan bagaimana memastikan bahwa guru memiliki kapasitas dan instrumen untuk menjalankannya. Bila hal ini dijalankan, maka KKM berbasis individual siswa lebih mungkin untuk diterapkan.²

Skema Remedi

Remedi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perbaikan (tentang belajar). Dalam konteks ini, peserta didik diharapkan untuk memperbaiki cara belajarnya untuk mendapatkan nilai tertentu. Pada praktiknya, guru-guru memberikan sejumlah soal untuk memperbaiki nilai peserta didik yang dianggap kurang memahami materi tertentu. Dalam kondisi ini, remedi dapat dikatakan hanya sebagai upaya formalitas untuk memperbaiki nilai peserta didik yang di bawah standar KKM. Melalui skema ini, pemahaman peserta didik terhadap materi tertentu justru tidak bertambah. Remedi sering kali hanya berdampak pada bertambahnya hafalan jawaban peserta didik mengenai soal tertentu. Pada kasus paling buruk, ketika remedi telah dilakukan dan peserta didik belum juga memahami materi, sebagian besar guru mengambil langkah pendek, yaitu dengan mengontrol nilai peserta didik.

Dalam buku *Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor SD* yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SD (2014) disebutkan bahwa remedi dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis nilai ulangan harian untuk mendeteksi kemampuan siswa. Hasil ulangan harian menjadi dasar apakah guru akan melakukan remedi secara individu atau secara klasikal (apabila sejumlah 75% siswa belum memenuhi kemampuan minimal). Namun, panduan tersebut tidak secara jelas menjelaskan mekanisme remedi.

Dalam kajian ini, kami sepakat bahwa konsep remedi seharusnya merujuk kepada *remedial teaching* yang menurut Ischak S.W. dan Warji (1982) merupakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka memperbaiki pemahaman peserta didik yang terprogram dan tersusun sistematis. Praktik dalam *remedial teaching* diharapkan tidak hanya memberikan 'soal tambahan' untuk mengontrol nilai peserta didik, tetapi membuat skema pembelajaran yang terprogram. Untuk membenahi nilai peserta didik, guru dapat melakukan dua hal penting. *Pertama*, melakukan diagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik (lihat Lampiran 3

² INOVASI dan TASS telah bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mengembangkan instrumen yang membantu guru mengidentifikasi kemampuan fungsional siswa, baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Instrumen ini disebut dengan Profil Belajar Siswa, yang pada awalnya dikembangkan untuk membantu guru mengidentifikasi kondisi Anak Berkebutuhan Khusus terkait dengan kesulitan fungsional. Dengan adaptasi dan penyesuaian instrumen agar sesuai kebutuhan lokal, maka instrumen ini dapat diterapkan untuk semua siswa (lihat Lampiran 3. Instrumen Profil Belajar siswa dan Lampiran 4. Adaptasi Profil Belajar Siswa).

dan 4). *Kedua*, dengan pemberian pembelajaran ulang di sekolah dengan metode dan media yang berbeda. Jika dibutuhkan, guru diharapkan memberikan bimbingan intensif kepada peserta didik satu per satu. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan untuk merevisi dan menyebutkan perlunya *remedial teaching* yang terprogram pada buku *Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor SD*.

KKM dan Akreditasi Sekolah

Permasalahan *katrol* nilai yang dilakukan oleh guru salah satunya disebabkan oleh masuknya KKM sebagai salah satu indikator dalam akreditasi sekolah. Berdasarkan Permendikbud 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), salah satu poin pembentuk kriteria akreditasi adalah standar penilaian yang ditetapkan sekolah. Dari hasil FGD bersama guru dan kepala sekolah di lokasi penelitian, terdapat asumsi yang sama antara satu lokasi dengan lokasi lain yang menyebutkan bahwa jumlah peserta didik yang melampaui KKM menjadi salah satu indikator capaian akreditasi sekolah. Oleh karena asumsi tersebut, guru sering kali mendapat tekanan dari kepala sekolah, dan kepala sekolah mendapatkan tekanan dari dinas pendidikan untuk meloloskan peserta didik yang tidak melampaui nilai KKM demi mengejar akreditasi.

Namun setelah kami mengkaji lebih jauh, sebetulnya materi akreditasi tidak mensyaratkan jumlah siswa yang melampaui KKM, namun hanya mensyaratkan bahwa unsur pembentuk KKM sudah sesuai dengan Permendikbud 23/2016. Dengan kata lain, terdapat salah tafsir mengenai indikator jumlah siswa yang melampaui KKM sebagai bagian dari materi akreditasi sekolah, baik di tingkat sekolah maupun dinas pendidikan.

Untuk memperjelas hal tersebut, kita dapat memeriksa Permendikbud 002/H/AK/2017 tentang Perangkat Akreditasi SD/MI, di mana poin yang menyangkut tentang KKM hanya ada satu, yaitu pada nomor 108, yang berbunyi: "*sekolah dasar/madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) seluruh mata pelajaran dengan mempertimbangkan: (1) karakteristik peserta didik, (2) karakteristik mata pelajaran, (3) kondisi satuan pendidikan, (4) analisis hasil penilaian.*" Pada Permendikbud tersebut tidak disebutkan sedikit pun tentang jumlah siswa yang melampaui KKM maupun yang tidak, sehingga dapat dinilai bahwa asumsi mengenai KKM sebagai bagian dari perangkat akreditasi hanya salah tafsir dalam memahami regulasi. Untuk itu, perlu upaya sosialisasi baik kepada guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan agar dapat memahami regulasi terkait secara holistik. Selain itu, sosialisasi atas peraturan yang baru diterbitkan menjadi hal yang krusial untuk mengurangi salah tafsir yang dapat berakibat pada tidak terlaksananya tujuan dari regulasi dimaksud.

Selain itu, kami juga mencatat permasalahan yang disinyalir sudah ditangani secara cepat oleh Kemdikbud, yaitu pelaksanaan KKM yang bertolak belakang dengan semangat UN. Jika dicermati lebih dalam pada uraian Permendikbud 23/2016 setidaknya dapat ditarik dua kesimpulan: *pertama*, bahwa KKM ditentukan oleh setiap satuan pendidikan; *kedua*, bahwa unsur pembentukan KKM ditentukan oleh kondisi pada setiap satuan pendidikan yang artinya bahwa KKM di satu sekolah bisa jadi berbeda dengan sekolah lainnya. Dengan berdasarkan pada asumsi tersebut, maka proses pembelajaran pada setiap sekolah akan berbeda-beda dan kontekstual. Namun, di sisi lain pemerintah memiliki kebijakan standarisasi kompetensi melalui UN. Kami menilai antara UN dan KKM merupakan dua hal yang bertolak belakang. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan UN yang telah dilakukan selama ini sudah cukup tepat.

C. PERSOALAN SEPUTAR GURU DAN PEMBELAJARAN

Teknologi informasi telah berkembang pesat dan berdampak pada teknologi pembelajaran, namun peran guru dan tenaga kependidikan dalam pendidikan tidak bisa tergantikan. Hal ini terutama dalam aspek nonkognitif, seperti penanaman nilai-nilai dan pendidikan karakter pada peserta didik. Peran dan fungsi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dipayungi oleh 4 undang-undang, yaitu UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU 32/2014 Jo. UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai catatan, terdapat perbedaan nomenklatur “pendidik” dan “guru” antara UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

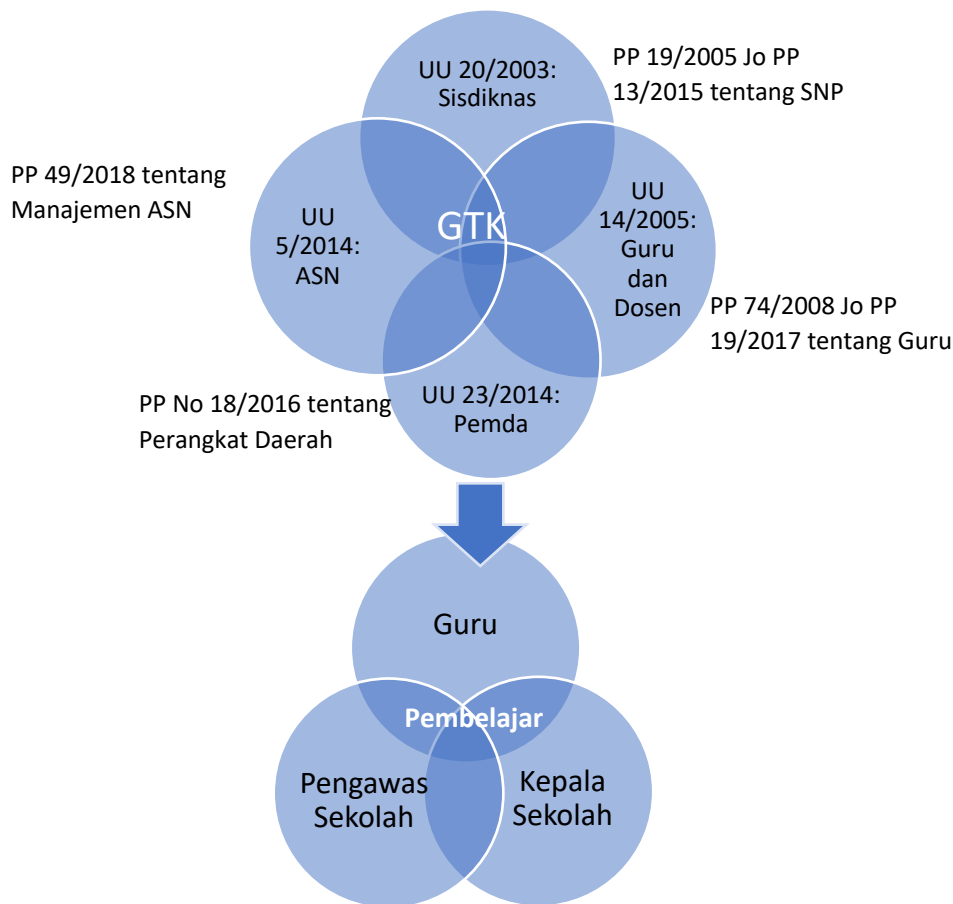
Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional diatur melalui UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama berkaitan dengan standar teknis. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut menyangkut kewajiban pendidik, yaitu: a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pengakuan guru sebagai tenaga profesional diatur melalui UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, di mana guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 2). Sebagai agen pembelajaran, guru berfungsi untuk meningkatkan martabat dan mutu pendidikan nasional (Pasal 4). Sebagai tenaga profesional, guru berkewajiban memiliki kualifikasi akademik (S1/D4), kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan personal), sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8).

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diatur melalui UU 5/2014 tentang ASN, pasal 26, ayat (2), bagian b. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPANRB) memiliki kebijakan umum terkait manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai ASN, dan sistem pensiun ASN. Pada Pasal 44, bagian d, disebutkan bahwa tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; sementara dalam Pasal 47, bagian b, disebutkan bahwa fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah menyelenggarakan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, dan pensiun.

Pendidik sebagai aparatur pemerintah daerah juga diatur melalui UU 32/2014 Jo. UU 9/2015, di mana kewenangan pemerintah pusat meliputi: a. pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, dan b. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi; kewenangan pemerintah provinsi, meliputi: pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.

Keterkaitan antarperaturan mengenai GTK tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini:



C.1. Regulasi Terkait Guru dan Pembelajaran

Proses pelaksanaan pembelajaran oleh guru diatur oleh Kemendikbud melalui penerbitan Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan ini merupakan turunan dari UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar proses didefinisikan sebagai kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

Standar ini menggambarkan kriteria minimal yang harus terlaksana dalam proses pembelajaran yang meliputi aspek karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Bagian ini fokus membahas aspek di atas dengan aturan-aturan yang berpotensi menghambat inovasi dan/atau peningkatan mutu pembelajaran, termasuk juga rekomendasi untuk aturan yang sudah teridentifikasi.

Karakteristik Pembelajaran

Dalam standar proses, dijelaskan bahwa pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan taksonomi yang menyangkut tiga ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap ranah memiliki gradasi seperti tabel di bawah ini:

Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji
		Mencipta

Gradasi ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi guru, baik untuk melaksanakan pembelajaran maupun penilaian. Namun, analisis yang dilakukan Case (2013) pada taksonomi serupa yang dikembangkan oleh Bloom menunjukkan bahwa pendekatan taksonomi dapat membatasi kemampuan siswa untuk berpikir di atas pola gradasi tertentu. Pendekatan taksonomi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti pandangan bahwa belajar adalah suatu proses linear dari yang paling sederhana (mengingat) sampai yang paling kompleks (menciptakan) (ACDP, 2016). Pada kenyataannya, pengetahuan (termasuk juga sikap dan keterampilan) tidak berkembang 100% linear dan rigid sesuai dengan gradasi tersebut. Selain itu, pemahaman guru bahwa domain pengetahuan dimulai dari mengingat baru kemudian mengevaluasi bisa menjadi justifikasi bagi guru untuk hanya fokus pada aspek mengingat yang dianggap lebih mudah dan prasyarat untuk aspek yang lebih tinggi.

Aturan gradasi ini tampaknya perlu ditinjau ulang baik secara konsep maupun implementasinya di lapangan. Penting untuk mengeksplorasi apakah gradasi ini justru membantu atau menghambat guru untuk mendorong siswa berpikir kritis. Eksplorasi bisa dilakukan termasuk pada turunan gradasi di kurikulum dan buku teks.

Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud 22/2016, terdapat dua dokumen perencanaan pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, regulasi ini juga mengatur komponen minimal yang harus ada pada dua dokumen tersebut.

Berdasarkan data dari lapangan menunjukkan bahwa penyusunan dokumen ini menjadi sebatas kewajiban administrasi dan belum berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, maka praktik melakukan *copy-paste* dalam pengembangan dokumen ini sangat umum terjadi. Untuk mereka yang berupaya menyusun secara mandiri, proses pengembangan dokumen pembelajaran dengan format yang baku juga dianggap menyita waktu guru. Keterbatasan waktu guru ini berpotensi menghambat mereka untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kualitas.

Menyikapi hal tersebut, Mendikbud mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan guru untuk mengembangkan RPP satu halaman yang memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Saat ini, guru dapat membuat RPP secara bebas dengan format yang fleksibel. Untuk mendukung implementasi surat edaran ini, Kemendikbud perlu melakukan revisi Permendikbud 22/2016 yang masih mensyaratkan bahwa RPP harus terdiri dari 13 komponen minimal. Selain itu, perlu ditekankan bahwa RPP yang disusun adalah RPP yang bermakna, artinya RPP menjadi pedoman guru dalam menyampaikan pembelajaran. Bila merujuk kepada pendidikan inklusif, maka RPP perlu

memperhatikan kondisi individual siswa, berdasarkan pemetaan kompetensi yang dilakukan oleh guru.³

Pelaksanaan Pembelajaran

Salah satu yang diatur dalam pembelajaran adalah kisaran rombongan belajar untuk setiap satuan pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD, jumlah rombongan belajar harus berkisar antara 6-24 kelas. Jumlah ini menggunakan pendekatan 1 jenjang kelas memiliki 1 rombongan belajar.

Pendekatan di atas dirasakan tidak efektif untuk diimplementasi di wilayah dengan populasi rendah, di mana jumlah siswa per kelas sangat sedikit dan juga sulit diimplementasikan di daerah dengan keterbatasan guru. Model ini juga menghambat pendekatan *multigrade*, yaitu pendekatan yang menggabungkan pembelajaran lintas kelas (lebih dari 1 jenjang kelas) yang dilakukan oleh satu guru.

Analisis ini merekomendasikan untuk merevisi aturan dan/atau menambah catatan terkait regulasi rombongan belajar. Revisi dan/atau catatan ini bertujuan untuk membuka ruang untuk daerah-daerah dimana pendekatan *multigrade* di sekolah bisa lebih efektif untuk mengimplementasi model tersebut. Little (2001) menyebutkan, terdapat beberapa kriteria daerah yang dapat menerapkan sistem pembelajaran *multigrade*, yaitu sekolah yang ada di daerah dengan populasi rendah (jumlah siswa terbatas), sekolah yang memiliki kelas jauh, serta sekolah dengan guru terbatas dan tingkat kehadiran guru yang rendah.

C.2. Regulasi Terkait Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Beberapa studi menunjukkan bahwa guru merupakan faktor yang paling memengaruhi hasil belajar siswa dibandingkan aspek lainnya, seperti karakter individu serta lingkungan dan keluarga siswa. Bahkan berkenaan dengan capaian siswa dalam tes literasi dan numerasi, faktor guru berdampak dua sampai tiga kali lipat dibandingkan faktor lainnya, seperti fasilitas dan kepemimpinan di sekolah (<https://www.rand.org>). Survei akhir SIPPI (Survey Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia) yang dilakukan di sekolah mitra INOVASI juga mengindikasikan keterkaitan antara peningkatan hasil literasi dan numerasi siswa dengan perubahan praktik mengajar guru di dalam kelas, seperti penggunaan media sesuai konsep yang diajarkan dan proses pembelajaran yang berfokus pada siswa. Dalam hal ini, pemangku kebijakan telah menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki guru, yang merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan.

Kemendikbud telah mengatur kualifikasi dan kompetensi guru melalui Permendikbud 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Permendikbud ini adalah turunan dari PP 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mencakup aturan terkait Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pasal 28 dalam PP ini mengharuskan pendidik untuk memiliki tiga hal, yaitu: kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

³ Di tahun 2017, tim ACDP dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) merancang contoh RPP Unit dan Harian yang berfokus pada: (a) kemajuan pembelajaran dan pengembangan konsep dan keahlian, (b) gagasan pokok atau konsep inti dalam disiplin yang tercermin dalam kompetensi dasar, (c) pembelajaran aktif, yaitu yang bertumpu pada siswa sebagai pihak yang aktif mencari pengetahuan dan berdiskusi, dan (d) penilaian formatif agar guru dapat mengarahkan pengajaran sesuai pengetahuan masing-masing siswa. Jika RPP versi sebelumnya dipandang sangat administratif, draf RPP tersebut dianggap lebih jelas, sederhana, dan berfokus pada pengajaran yang akan dilaksanakan guru. INOVASI juga memiliki beberapa contoh RPP yang lebih sederhana yang telah dibuat oleh sekolah yang mendapat intervensi maupun non-intervensi (lihat Lampiran 2. Contoh RPP Sederhana).

tujuan pendidikan nasional. Studi ini merekomendasikan kajian ulang terhadap ketentuan “sehat jasmani dan rohani” yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta bertentangan dengan PP 70/2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.⁴

Kualifikasi Guru

Terkait dengan kualifikasi guru, Pasal 29 dalam PP 19/2015 mengharuskan pendidik pada jenjang SD/MI untuk memiliki 3 hal, yaitu: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Demikian juga dengan pendidik pada SMP/MTs yang diharuskan memiliki: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs. Kualifikasi akademik yang sama juga disebutkan dalam lampiran Permendikbud No. 16/2007, dengan catatan tambahan bahwa kualifikasi tersebut harus diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Persyaratan ini menjamin supaya para pendidik merupakan produk dari institusi perguruan tinggi yang telah memenuhi standar mutu minimal. Hal ini penting terutama mengingat semakin tingginya jumlah lulusan lembaga pendidikan guru dan tenaga kependidikan (LPTK) yang tidak sebanding dengan kebutuhan guru, sehingga perlu dijaga kualitasnya.

Namun demikian, berbagai ketentuan di atas dianggap oleh beberapa pemangku kebijakan termasuk dari dinas pendidikan di daerah sebagai salah satu tantangan dikarenakan masih belum terpenuhinya jumlah pendidik berdasarkan kualifikasi sesuai peraturan di atas. Selain jumlah guru di sekolah terbatas, sebagian besar di antaranya merupakan guru honorer yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan belum memiliki sertifikat profesi. Hal ini ditengarai akibat proses rekrutmen guru yang belum efektif. Sistem rekrutmen guru dianggap bermasalah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana basis data yang dijadikan dasar rekrutmen merupakan data lama yang tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, pengangkatan guru oleh pemerintah pusat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga ada kelebihan guru di suatu sekolah dan kekurangan guru di sekolah lainnya. Guru yang ditempatkan di daerah pun terkadang hanya bertahan sebentar dan kemudian meminta mutasi, sehingga muncul aspirasi terkait perekrutan “putra daerah” yang dipandang lebih menjamin keberlangsungan penempatan guru di daerah.

Sejauh ini, respon pemerintah lebih cenderung pada pemenuhan kekurangan guru, namun belum pada pengaturan di wilayah yang kelebihan guru. Padahal berdasarkan *cost-benefit analysis* yang dilakukan oleh USAID PRIORITAS pada 2014, diperkirakan bahwa penataan guru akan jauh lebih efisien daripada pengangkatan guru baru, dan bisa menghemat APBN hingga Rp 230 Triliun dalam 10 tahun (<https://prioritaspendidikan.org>). Karena itu, analisis ini merekomendasikan tinjauan ulang pada implementasi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Tahun 2011 Tentang

⁴ Selain itu, konsep pendidikan inklusif juga belum tercermin dalam kurikulum. Kajian ACDP (2016) menemukan ilustrasi yang mencerminkan keragaman etnis dan ras, serta keseimbangan antara anak perempuan dan anak laki-laki, dalam buku pelajaran. Namun demikian, belum tersedia ilustrasi yang menyertakan keragaman fisik, misalnya orang dewasa atau anak-anak difabel yang menggunakan kruk atau kursi roda.

Penataan dan Pemerataan Guru, serta pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang melakukan penataan guru.

Kompetensi Guru

Terkait dengan kompetensi akademik, Pasal 28 dalam PP 19/2015 menyebutkan bahwa setiap pendidik harus memiliki kompetensi akademik sebagai agen pembelajaran, yang meliputi: a. kompetensi pedagogik; b. kompetensi kepribadian; c. kompetensi profesional; dan d. kompetensi sosial. Empat kompetensi guru ini kemudian dijelaskan secara rinci dalam lampiran Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Dalam lampiran Permendiknas tersebut, indikator kompetensi pedagogik dan profesional guru cenderung menggunakan pendekatan teoretis, seperti menguasai berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; serta menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Meskipun penting, indikator kompetensi tersebut cenderung lebih terkait dengan aspek kognitif daripada kompetensi pedagogik guru, serta lebih berorientasi pada guru daripada siswa. Beberapa informan studi mengindikasikan kesenjangan antara standar kompetensi akademik guru yang ideal tersebut dengan realitasnya di lapangan. Masih banyak guru yang belum memahami apalagi menguasai metode dan materi pembelajaran.

Sebetulnya beberapa ketentuan dalam lampiran Permendiknas ini mendorong inovasi dan kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran, seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Dalam implementasinya, tidak semua guru (terutama guru senior) menguasai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pembelajaran dan pengembangan diri mereka. Menurut kepala sekolah dan guru sendiri, hal ini ada kaitannya dengan rendahnya motivasi guru yang merasa berada dalam “zona nyaman” dan merasa cukup hanya dengan mengajar tanpa perlu mencoba hal baru di kelas maupun mengembangkan diri secara terus menerus. *Mindset* guru yang tidak berkembang menuntut adanya faktor pendorong dari luar seperti tagihan, kompetisi, atau pelatihan dari dinas pendidikan/LPMP untuk meningkatkan daya inovasi dan kreativitas guru, meskipun sebetulnya mereka seharusnya mengalokasikan tunjangan sertifikasi untuk pengembangan diri.

Di satu sisi, rendahnya kompetensi guru dikaitkan oleh beberapa informan dengan rendahnya kualitas LPTK, sehingga guru yang dihasilkan tidak serta merta siap mengajar. Di sisi lain, kecilnya proporsi anggaran yang dialokasikan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kompetensi guru sebagaimana tertera dalam lampiran Permendiknas di atas. Hasil studi ACDP (2017) menunjukkan pentingnya pelatihan yang berkesinambungan untuk guru agar guru secara terus menerus memperkaya pengetahuan dan keterampilannya, seperti mengikuti perkembangan kurikulum, pedagogi, dan praktik pengajaran, untuk menghasilkan pendidikan bermutu seperti yang ditemukan di Singapura. Karena itu, analisis ini merekomendasikan penguatan kapasitas guru di dalam jabatan, di mana kurikulum program peningkatan pembelajaran (PKP) dipetakan berdasarkan kurikulum program profesi guru (PPG) sehingga bisa dilaksanakan secara lebih efisien dan koheren.

Penilaian Kinerja Guru

Beberapa guru menyebutkan bahwa proses penilaian guru terkadang tidak dilaksanakan secara objektif, dan dengan demikian memengaruhi kinerja mereka di kelas/sekolah karena sebagian besar penilaian hanya didasarkan pada pemenuhan catatan kehadiran dan administrasi. Sejauh ini, jabatan fungsional guru pun belum mencerminkan hasil kompetensi guru di mana hasil penilaian kinerja guru tidak sejalan dengan hasil uji kompetensi guru (UKG).

Analisis ini merekomendasikan tinjauan kembali terhadap Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru. Selain itu, direkomendasikan supaya tunjangan profesi guru tidak lagi bersifat otomatis, namun disesuaikan dengan kompetensi dan capaian kinerja guru. Hal ini akan memungkinkan guru bekerja lebih profesional karena berdampak pada penghasilan yang diterimanya. Implikasi kebijakannya, perlu disiapkan sistem khusus yang memastikan penilaian kinerja benar-benar terukur dan bersifat objektif.

C.3. Regulasi Terkait Beban Kerja Guru

Sesuai amanah UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas ini menjadikan guru sebagai tenaga profesional yang memegang peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beban kerja guru diatur dalam Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (lihat Lampiran 1). Peraturan ini adalah turunan dari PP 74/2008 tentang Guru yang telah diubah dengan PP 19/2017 tentang Perubahan atas PP 74/2008. Permendikbud ini mengatur beban kerja guru dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu kepala sekolah dan pengawas untuk melaksanakan beban kerja selama 40 jam per minggu pada satuan administrasi pangkal. Jam kerja efektif bagi guru mencakup tugas utama pembelajaran (melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), menilai hasilnya, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan.

Dalam mengemban tugas fungsional melaksanakan pembelajaran, guru diwajibkan memenuhi minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Pemenuhan 24 jam tatap muka pembelajaran merupakan syarat untuk menerima tunjangan profesi. Tugas tambahan yang diberikan kepada guru bisa dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka yang perincian nilai ekuivalensinya sudah diatur dalam Permendikbud ini.

Demikian juga bila guru mendapat tugas tambahan di luar tugas-tugas yang bisa diperhitungkan ekuivalensinya, baik dari dinas maupun kepala sekolah, tugas tambahan tersebut dapat dihitung sebagai pemenuhan beban kerja sebanyak 40 jam. Termasuk di dalam kategori ini adalah ketika guru memenuhi kewajiban mengikuti kegiatan PKB, baik yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, guru diharapkan memenuhi tugas sekitar 6,7 jam per hari (untuk 6 hari kerja) dan 8 jam per hari (untuk 5 hari kerja).

Studi mengenai beban administrasi guru, kepala sekolah, dan pengawas menemukan bahwa instrumen yang digunakan guru untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi guru terlalu rumit dan kaku (Pratama dan Arsendy, 2016). Hal ini menyebabkan pemenuhan administrasi menjadi beban dan dapat mengalihkan guru dari tugas pokok untuk melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Studi ini menemukan tiga isu utama terkait beban administrasi guru, yaitu pengurusan Tunjangan Profesi Guru (TPG), pengurusan kenaikan

pangkat/golongan, dan manajemen Dapodik. Persoalan TPG juga merupakan topik aduan terbesar kedua di Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud. Data yang dirilis ULT antara Januari-Desember 2018 menunjukkan bahwa pengaduan terkait tunjangan profesi pendidik menduduki peringkat kedua untuk jumlah kasus terbesar. Jumlah ini sudah separuh dari jumlah pengaduan di tahun sebelumnya (Unit Kerja Layanan Terpadu, 2017). Unit ini mencatat bahwa posisi dan jumlah kasus terkait tunjangan profesi ini masih tetap sama di tahun 2019. Sementara itu, guru SMP dan guru SD adalah kelompok pertama dan kedua terbesar yang mengajukan pengaduan (Unit Layanan Terpadu, 2018 dan 2019).⁵

Isu beban administrasi guru ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terkait dengan perangkat pembelajaran dan nonperangkat pembelajaran. Isu beban kerja yang terkait dengan perangkat pembelajaran merupakan komponen yang lebih erat terkait dengan mutu pembelajaran; namun demikian, beban administrasi nonperangkat pembelajaran juga berpengaruh terhadap kinerja guru di dalam kelas.

Administrasi terkait Perangkat Pembelajaran

Administrasi perangkat pembelajaran yang harus disiapkan guru adalah RPP, program tahunan, program per semester, silabus, analisis KI-KD, KKM, dan berkontribusi pada RPP *online* (biasanya melalui KKG mini). Selain beban kerja administrasi ini, guru perlu mengembangkan media pembelajaran dan memikirkan strategi pembelajaran aktif. Isu perangkat pembelajaran yang ditemukan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP dan penulisan rapor K13.

Untuk RPP, seperti dibahas di bagian sebelumnya, telah diterbitkan Surat Edaran untuk menyederhanakan dan rekomendasi agar Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses direvisi. Demikian juga perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap Petunjuk Teknis Penyusunan RPP di SD agar selaras dengan semangat Surat Edaran RPP dan semangat guru merdeka (lihat Lampiran 2). Perlu dipertimbangkan agar regulasi berikutnya menghindari kecenderungan regulasi yang menumbuhkan budaya untuk lebih menekankan aspek *compliance* (yang boleh dan tidak boleh), yang saat ini diperkuat oleh bentuk pengawasan yang menghambat guru untuk berinovasi, seperti ketatnya ketaatan terhadap penyusunan RPP sesuai format. Bentuk regulasi dan format supervisi yang ada saat ini ditengarai membentuk budaya untuk menunggu pedoman, perintah, dan petunjuk.

Sebagaimana ditemukan dalam kajian ACDP (2017), guru merasa metode penilaian saat ini membingungkan dan tidak selaras satu sama lain. Ada banyak kendala saat guru harus melengkapi lembar penilaian, terutama dalam menilai sikap dan perilaku. Sebagian guru melakukan penilaian kedua komponen ini setiap hari dan merasa terbebani. Untuk penulisan raport K13, guru menyampaikan bahwa dokumen penilaian terlalu banyak, terdapat format *e-rapor* dan juga rapor manual. Aspek penilaian meliputi penilaian akademik (mencakup tematik dan capaian berdasar mata pelajaran) dan perilaku (mencakup penilaian harian dan penilaian subjektif). Sementara itu, Petunjuk Teknis Penyusunan RPP SD juga memuat bentuk-bentuk format penilaian sebagai bagian dari RPP. Kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi juga menjadi salah satu kendala.

⁵ Data ini adalah data terkait dengan jumlah kunjungan ke Unit Layanan Terpadu. Pengaduan bisa juga dilakukan melalui kanal pengaduan tidak langsung, seperti telepon, portal dan email.

Administrasi non Perangkat Pembelajaran

Adapun isu non perangkat pembelajaran adalah kenaikan pangkat dan pengurusan TPG. Permendikbud 15/2018 juga mengatur persyaratan dokumen administrasi bagi guru, kepala sekolah dan pengawas untuk pemenuhan ekuivalensi tugas-tugas tambahan agar tugas tambahan tersebut bisa diperhitungkan dalam pemenuhan 24 jam tatap muka per minggu. Jenis-jenis dokumen yang dipersyaratkan di antaranya adalah surat keputusan atau surat tugas.

Permasalahan yang ditemukan pada studi sebelumnya yaitu pemberkasan yang berulang-ulang yang menyebabkan terbuangnya waktu guru, masih ditemukan dalam studi ini. Selain itu, masih terdapat jenis dokumen administrasi yang menekankan pemenuhan administrasi (*compliance*) dan kurang bermakna untuk memahami kualitas proses maupun capaian seperti surat keterangan pembinaan dan daftar hadir (bagi pengawas) dan jadwal piket. Pengurusan TPG yang menyita waktu tidak diperhitungkan dalam pemenuhan beban kerja tatap muka atau beban kerja 40 jam per minggu.

Administrasi Sekolah (Bendahara BOS)

Salah satu bentuk tugas tambahan nonperangkat pembelajaran lainnya bagi guru adalah menjadi bendahara BOS, mengingat bahwa hanya PNS yang diperbolehkan menjadi bendahara BOS dan menyelesaikan LPJ. Tugas sebagai bendahara BOS cukup membebani dan menyita waktu.

Salah satu informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“... harus mengerjakan LPJ dana BOS sepulang sekolah bahkan terkadang dibawa hingga ke rumah. Sudah menjabat sembilan tahun sebagai bendahara BOS tanpa pernah diganti. Yang PNS, bendahara gantian 5 tahun sekali! Gak ada yang mau. Saya sudah 9 tahun menjadi bendahara.” (Sumarto, Guru di Jawa Timur)

Tambahan tugas sebagai bendahara BOS sebenarnya melanggar regulasi mengenai pemenuhan beban kerja guru (periksa Permendikbud 15/2018). Selain tidak bisa diperhitungkan dalam jam tatap muka, beban kerja tersebut sangatlah mengganggu tugas utama guru yang harus mempersiapkan pembelajaran. Terkadang, pelaksanaan pembelajaran juga terganggu karena koordinasi dengan dinas terkait harus *on site* dan berlangsung pada jam pembelajaran.

Persoalan ini mungkin terkait dengan pemahaman atau interpretasi mengenai boleh tidaknya sekolah mengangkat tenaga administrasi. Sebenarnya dalam Permendikbud 6/2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah BAB III Pasal II Ayat (1) menyebutkan jika susunan organisasi SD terdiri atas: (a) Kepala; (b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan (c) Kelompok Jabatan Pelaksana. Namun, faktanya banyak sekolah dasar yang tidak memiliki tenaga kependidikan khususnya yang menangani administrasi. Selaras dengan peraturan ini, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 971-7791 Tahun 2018, tertanggal 28 September 2018, tentang Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Dalam Negeri menyebutkan bahwa Bendahara BOS harus dari unsur PNS yang disetujui oleh Bupati.

Kondisi tersebutlah yang menyebabkan banyak guru merangkap tugas sebagai bendahara BOS. Beban administrasi pada akhirnya mengalihkan guru dari tugas dan fungsi utamanya. Di samping itu, data Bank Dunia tahun 2018 menyebutkan jika pertumbuhan jumlah guru non-PNS sangat signifikan dari 2001 hingga 2010 (Ratna Kesuma, dkk., 2018). Jika pada rentang tahun tersebut jumlah total guru naik 1,5 kali lipat, maka pertumbuhan

jumlah guru non-PNS naik hingga 6 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru non-PNS terhadap PNS mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai persoalan guru di atas, maka deregulasi di bidang pendidikan merupakan kebutuhan mendesak agar regulasi yang berlaku sesuai dengan semangat untuk mendorong semua pemangku kepentingan berkonsentrasi pada upaya peningkatan mutu pendidikan, berfokus pada kepentingan terbaik peserta didik, dan memberikan ruang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas dan fungsi pokoknya yang memberikan dampak terbesar pada peningkatan mutu. Dibutuhkan perubahan paradigma dalam menyusun kembali regulasi, agar regulasi tidak menghambat tumbuhnya rasa percaya diri guru untuk mengambil inisiatif. Perlu tinjauan kembali aspek-aspek yang perlu diatur dengan regulasi dan juga aspek-aspek yang cukup diberikan pedoman secara garis besar. Demikian juga regulasi terkait sistem penghargaan bagi pemenuhan fungsi profesionalitas guru, pengawas, dan kepala sekolah agar regulasi mengarah kepada upaya peningkatan mutu dan mengurangi secara signifikan pemenuhan administrasi yang tidak memiliki fungsi langsung kepada mutu. Permasalahan regulasi di Kemendikbud perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait lainnya agar perubahan tersebut bisa dipastikan konsistensinya dengan berbagai aspek lain, termasuk aspek pemeriksaan dari pihak-pihak lain.

D. PERSOALAN SEPUTAR BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah diluncurkan pertama kali tahun 2005. Program ini di satu sisi merupakan bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (2003-2005) (<https://www.kompasiana.com/balqisisna>). Di sisi lain, program BOS dapat dianggap sebagai bagian dari reformasi dan desentralisasi tata kelola pendidikan (Al-Samarrai, Fasih, Hasan, & Syukriyah, 2014), yang dimulai dengan perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (2003), UU Guru dan Dosen (2005), dan PP Standar Nasional Pendidikan (2005).

Berbagai kajian sudah melihat bagaimana BOS mampu membantu mendorong capaian akses pendidikan. Salah satu kajian yang mengkaji BOS secara holistik oleh Al-Samarrai et al. (2014) menyebutkan bahwa BOS terbukti dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan, yaitu:

1. memperbesar alokasi anggaran untuk layanan pendidikan, sehingga mengurangi biaya pendidikan yang dibebankan pada rumah tangga;
2. mengarahkan dukungan pembiayaan untuk meyakinkan anak dari keluarga yang tidak mampu tetap bersekolah; dan
3. memperkuat proses manajemen berbasis sekolah (MBS) melalui penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dan melibatkan komunitas di sekitar sekolah.

Dari tahun ke tahun anggaran BOS terus meningkat, seiring pertumbuhan alokasi BOS per siswa dan meningkatnya jumlah siswa penerima BOS. Alokasi per siswa BOS sudah mengalami peningkatan paling sedikit lima kali sepanjang 15 tahun penyaluran dana BOS. Pada tahun 2015, dengan mulai diperkenalkannya BOS-SM, yaitu dana BOS yang ditujukan pada siswa SMA/SMK sederajat, besar anggaran BOS terus membesar.

Sebagai gambaran di tahun anggaran 2019, ditargetkan 57 juta siswa akan menerima dana BOS, dengan nilai anggaran sebesar Rp 50 triliun, atau 11% dari total anggaran sektor pendidikan yang sebesar Rp 487,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dari alokasi awal di tahun 2005, yaitu sebesar Rp 638 milyar (SMERU, 2006) dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 79 triliun. Perkembangan alokasi dana BOS ini mulai mengurangi kontribusi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Adanya perkembangan dan perubahan pada mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan BOS yang terus diperbaiki, terdapat anggapan bahwa regulasi yang mengatur penggunaan BOS membuat sekolah tidak dapat melakukan inovasi terutama yang terkait dengan peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, maka dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana regulasi BOS yang ada mampu mendorong atau justru menghambat inovasi oleh sekolah. Untuk mengkaji regulasi terkait BOS, fokus kajian akan dilakukan pada Petunjuk Teknis pelaksanaan BOS (Juknis BOS) yang setiap tahun dilakukan pemutakhiran dan ditetapkan dalam bentuk Permendikbud.

D.1. Perkembangan Juknis BOS 2015-2019

Hampir di setiap awal tahun (setelah tahun 2017), atau di akhir tahun anggaran sebelumnya (sebelum tahun 2016), Kemdikbud menerbitkan peraturan menteri yang menetapkan Juknis penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana BOS. Peraturan menteri ini mencakup definisi, tujuan, sasaran, waktu penyaluran (*tranche*), ketentuan sekolah penerima, organisasi pelaksana BOS dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah, komponen pembiayaan yang dapat didanai dengan dana BOS, komponen biaya yang tidak boleh didanai dengan BOS, serta mekanisme pelaporan dan proses penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk membatasi cakupan analisis, maka Juknis yang dicakup dalam kajian ini adalah Juknis BOS tahun anggaran 2014-2019. Juknis BOS sebelum tahun 2014 memiliki variasi yang lebih besar seiring dengan berubahnya mekanisme penyaluran BOS yang sebelumnya dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat (2005-2009), dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (2010), dan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (2011).⁶

Definisi dan Pengertian

Definisi BOS terus berkembang sesuai perubahan prioritas pemerintah di sektor pendidikan, serta mengikuti perubahan mekanisme penyaluran dan tata kelola dana BOS.

Tahun Anggaran	Definisi Program BOS
2014-2015	BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
2016	BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
2017-2018	BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
2019	Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non-personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik ⁷

Sumber: Juknis BOS (2014-2019)

Secara konsisten dari tahun 2005-2018 BOS selalu disebutkan sebagai penyedia pendanaan biaya operasi sekolah non-personalia. Baru pada 2019 definisi ini secara jelas menyebutkan bahwa BOS juga mencakup biaya operasi personalia. Tetapi, dari Juknis untuk tahun anggaran 2011 sekalipun, telah diperbolehkan untuk menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer. Kajian lebih lanjut untuk penggunaan dana BOS untuk biaya personalia dapat dilihat di bagian selanjutnya dari kajian ini.

Perubahan kunci terjadi di tahun 2016, ketika penyaluran BOS untuk Sekolah Menengah diintegrasikan pengelolaannya dengan dana BOS. Secara eksplisit disebutkan mulai tahun 2016 bahwa dana BOS mencakup untuk pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan Umum Dana BOS

Menurut Al-Samarrai et al.(2014) ada tiga tujuan yang tercapai melalui penyaluran dana BOS, tetapi merujuk Juknis BOS itu sendiri, tujuan umum BOS adalah:

⁶ Pada tahun anggaran 2020, diputuskan bahwa proses mekanisme penyaluran BOS akan dikembalikan melalui transfer langsung dari Pusat ke Rekening Sekolah. Walau perubahan ini dapat berujung pada perubahan signifikan pada petunjuk teknis BOS, tetapi sampai pada penulisan laporan ini (31 Januari 2020) petunjuk teknis yang baru belum disahkan.

⁷ Pada tahun anggaran 2019 diperkenalkan program BOS kinerja dan BOS afirmasi yang diharapkan dapat memberikan insentif bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja; dan sebagai langkah afirmasi bagi sekolah kecil yang berada di daerah 3T. Karena keterbatasan informasi terkait kedua program ini, dan implementasi yang terbatas maka kajian ini tidak mencakup kedua program tersebut.

No	2014	2017	2019
1	Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu	Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu	Membantu pendanaan biaya operasi dan non-personalia Sekolah
2			Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
3	Mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah	Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah

Dari melihat perkembangan tujuan Program BOS dan kajian Al-Samarrai et al. (2014) ini kita dapat melihat:

1. Adanya konsistensi tentang tujuan dalam dukungan pembiayaan BOS untuk mengurangi beban rumah tangga. Penyebutan tujuan ini dalam juknis sedikit berkembang dari yang sebelumnya berfokus pada dukungan wajib belajar sembilan tahun, menjadi lebih umum. Perubahan ini dapat dipahami mengingat diperluasnya cakupan BOS untuk jenjang pendidikan menengah (2015), mengikuti perluasan program wajib belajar yang juga mulai menekankan pentingnya pendidikan menengah.
2. Untuk tujuan terkait mutu, juga didapatkan adanya perluasan cakupan antar-Juknis BOS, dari sebelumnya hanya berfokus pada SPM (2014), menjadi fokus pada SPM dan SNP (2017) dan kemudian penyebutan penekanan pada kualitas proses pembelajaran (2019).

Sedangkan ada dua tujuan yang tidak secara eksplisit menjadi tujuan umum dari penyaluran dana BOS, yaitu:

1. Walau penguatan MBS tidak menjadi tujuan umum program BOS, Juknis BOS selalu menyebutkan bahwa pengelolaan BOS selalu menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kajian tentang keterkaitan BOS dan MBS akan menjadi sub-kajian tersendiri.
2. Terkait dukungan untuk siswa dari keluarga miskin, secara implisit hal ini disarikan dari tujuan umum pertama, yaitu “meringankan beban masyarakat terhadap beban biaya pendidikan” (Juknis 2014-2018). Pernyataan dukungan untuk siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu selalu disebutkan dalam tujuan khusus BOS.

D.2. Komponen Penggunaan Dana BOS

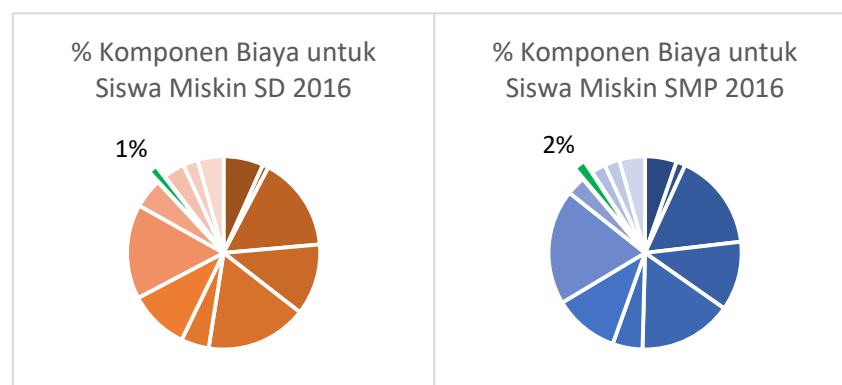
Salah satu bagian penting dari Juknis BOS adalah komponen penggunaan dana BOS. Secara garis besar Juknis BOS dapat dibagi menjadi dua kelompok periode. Kelompok pertama adalah periode sebelum T.A. 2016, di mana penggunaan Dana BOS dibagi menjadi 12 kelompok, dengan 1 kelompok lainnya yang hanya boleh digunakan bila kelompok biaya 1-12 sudah dapat dipenuhi. Mulai tahun 2017, Komponen Penggunaan Dana BOS dibagi menjadi 10 kelompok, dengan 1 kelompok lainnya.

Perbandingan dua model pengelompokan Komponen Penggunaan Dana BOS ini dapat dilihat di tabel berikut.

Tahun 2016 ke belakang	Tahun Anggaran 2017 ke depan
1. Pengembangan Perpustakaan (Buku Teks)	1. Pengembangan Perpustakaan (Buku Teks)
2. Kegiatan PPDB	2. Kegiatan PPDB
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler	3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
4. Kegiatan ulangan dan ujian	4. Kegiatan evaluasi pembelajaran
5. Pembelian bahan habis pakai	(dibagi ke komponen yang relevan)
6. Langganan daya dan jasa	7. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan rehab ringan dan sanitasi sekolah	8. Pemeliharaan dan perawatan sarpras sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan	9. Pembayaran honorer
9. Pengembangan profesi guru dan tendik	6. Pengembangan profesi guru dan Tendik
10. Membantu peserta didik miskin	(dihilangkan)
11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah	5. Pengelolaan sekolah
12. Pembelian dan perawatan komputer	10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media
13. Biaya lainnya	11. Biaya lainnya

Ada dua komponen yang tidak ditemukan pada daftar komponen biaya BOS pada panduan tahun 2017. Kedua komponen tersebut adalah pembelian bahan habis pakai (komponen ke-5) dan komponen bantuan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (komponen ke-10). Setelah mengkaji Juknis secara lebih jauh, dapat dipahami maksud dari penghapusan komponen bahan habis pakai, karena pembiayaan bahan habis pakai telah disebutkan dalam komponen lain (misal: bahan habis pakai untuk proses PPDB, bahan habis pakai untuk alat multi-media, bahan habis pakai untuk laboratorium).

Tetapi, penghapusan komponen bantuan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu menjadi hal yang harus dikaji lebih jauh. Walaupun tujuan khusus dari BOS masih menyebutkan dukungan pembebasan biaya dari siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dikhawatirkan dengan hilangnya komponen ini, maka pendekatan afirmatif untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu juga akan menjadi semakin tidak signifikan atau kecil. Menarik bahwa sejak Juknis BOS 2017, kata siswa miskin sudah tidak digunakan lagi – dan penyebutan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu hanya disebutkan pada tujuan khusus BOS saja, dan tidak ditemukan di bagian lain. Penting juga untuk digaribawahi bahwa besar komponen biaya untuk siswa miskin selama ini masih terbatas pada 1,5% (untuk jenjang SD) dan 1,9% (untuk jenjang SMP).



Pengadaan Komputer dan Alat Multimedia

Berbeda dengan pengembangan perpustakaan, komponen ini bermula dengan kriteria yang terbuka dan cenderung minimalis, tetapi seiring dengan perkembangan kriteria untuk komponen ini semakin mendetail dan mengikat.

Tahun	Deskripsi
2011	Pembelian komputer (<i>desktop/workstation</i>) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian <i>desktop/workstation</i> • <i>Desktop/workstation</i> 3 unit per tahun untuk SD, harus dicatat sebagai inventaris sekolah • <i>Printer</i> atau <i>printer plus scanner</i> • <i>Printer</i> 1 unit per tahun
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli komputer <i>desktop/workstation</i> untuk digunakan dalam proses pembelajaran, di mana jumlah maksimum bagi SD 5 unit/tahun ... Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan komputer <i>desktop/workstation</i> milik satuan pendidikan; • Membeli <i>printer</i> atau <i>printer plus scanner</i>, di mana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan <i>printer</i> milik satuan pendidikan; • Membeli laptop, di mana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp 6 juta. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan laptop milik satuan pendidikan; • Membeli proyektor, di mana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp 5 juta. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik satuan pendidikan; • Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komputer <i>desktop/workstation</i>, <i>printer/printer scanner</i>, laptop dan proyektor harus dibeli di toko resmi; ○ Proses pengadaan barang oleh satuan pendidikan harus mengikuti peraturan yang berlaku; ○ Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli komputer <i>desktop/workstation</i> berupa PC/<i>All in One Computer</i> untuk digunakan dalam proses pembelajaran, di mana jumlah maksimal bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5 unit/tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan dan/atau <i>upgrade</i> komputer <i>desktop/workstation</i> milik sekolah. • Membeli <i>printer</i> atau <i>printer plus scanner</i> maksimal 1 unit/tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan <i>printer</i> milik sekolah. • Membeli laptop maksimal 1 unit/tahun dengan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan atau <i>upgrade</i> laptop milik sekolah. • Membeli proyektor maksimal 5 unit/tahun dengan harga tiap unit maksimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah. • Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> ○ a. komputer <i>desktop/workstation</i>, <i>printer/printer scanner</i>, laptop dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi; ○ b. proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

	<ul style="list-style-type: none"> o c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
2019	<p>a. Membeli komputer desktop atau <i>workstation</i> berupa <i>Personal Computer</i> (PC) atau <i>all in one PC</i> untuk digunakan dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per sekolah dengan spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prosesor Intel Core i3 atau yang setara • memori standar 4GB DDR3 • hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; • CD/DVD drive; • monitor LED 18,5 inci; • sistem operasi Windows 10; • aplikasi terpasang <i>word processor</i>, <i>spreadsheet</i>, dan <i>presentation</i>; dan • garansi 1 (satu) tahun. <p>Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.</p> <p>b. Membeli pencetak (<i>printer</i>) atau printer plus pemindai (<i>scanner</i>) maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh digunakan untuk perbaikan printer milik Sekolah.</p> <p>c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> o prosesor Intel Core i3 atau yang setara; o memori standar 4GB DDR3; o hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; o CD/DVD drive; o monitor 14 inci; o sistem operasi Windows 10; o aplikasi terpasang <i>word processor</i>, <i>spreadsheet</i>, dan <i>presentation</i>; o garansi 1 tahun; <p>Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.</p> <p>d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> o sistem DLP; o resolusi XGA; o brightness 3000 lumens; o kontras ratio 15.000:1; o input HDMI, VGA, Composite, S-Video; o garansi 1 (satu) tahun. <p>Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.</p>

Melihat perkembangan penjelasan komponen pembelian komputer/alat multi media ini kita dapat melihat bagaimana peralatan teknologi informasi dan komputer digunakan di sekolah.

- Di tahun 2011, pembelian komputer hanya diperbolehkan satu unit komputer dan printer per tahun untuk digunakan oleh siswa.
- Di tahun 2014, batasan pembelian komputer diperlonggar menjadi tiga unit komputer dan satu unit *printer/printer+scanner*.
- Di tahun 2017, kembali diperlonggar jumlahnya menjadi lima unit komputer, dan satu printer. Di sini, mulai diperbolehkan untuk membeli laptop untuk digunakan sekolah. Pada tahun ini, batasan terkait harga sudah diperkenalkan.
- Di tahun 2019, batasan diperketat dengan adanya spesifikasi yang lebih detail. Tetapi untuk jenis barang yang dibelanjakan diperlonggar untuk pembelian proyektor sejumlah 5 unit per tahun untuk digunakan di ruang kelas.

Pengadaan Buku

Salah satu komponen pembiayaan BOS yang cukup konsisten dan selalu ditempatkan sebagai komponen pertama dari tahun ke tahun adalah Komponen Pengembangan Perpustakaan. Komponen ini, pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tersedianya Buku Teks Guru dan Buku Teks Siswa untuk proses pembelajaran.

Seiring perkembangan Juknis BOS, penjelasan komponen ini pun turut berkembang. Berikut ini adalah beberapa contoh tahapan perkembangan untuk komponen pembiayaan di jenjang SD.

Tahun	Deskripsi
2011	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan... Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.
2014	<ul style="list-style-type: none">• Diwajibkan membeli buku pegangan guru kurikulum 2013 semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember 2014), kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain.• Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi peserta didik untuk semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember 2014) sebanyak jumlah peserta didik, kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain.• Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu peserta didik satu buku• Langganan publikasi berkala• Akses informasi <i>online</i>• Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan• Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan• Pengembangan <i>database</i> perpustakaan• Pemeliharaan perabot perpustakaan• Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan
2016	<ul style="list-style-type: none">• Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran. Buku teks yang dapat dibeli satuan pendidikan adalah buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud.• (komponen lainnya mirip/sama dengan tahun-tahun sebelumnya)
2017	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan/atau membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran atau tema. Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari BOS sebagai berikut: a) Penyelenggara Kurikulum 2013 (K-13)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1) SD yang sudah melaksanakan K-13, maka buku yang harus dibeli merupakan buku untuk setiap tema pada Kelas 1 dan Kelas 4 semester II dan Kelas 2 dan Kelas 5 semester I. ▪ (2) SD yang baru melaksanakan K-13, maka buku yang harus dibeli merupakan buku untuk setiap tema pada Kelas 1 dan Kelas 4 semester I. ▪ (3) SD pelaksana K-13 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), maka khusus Kelas 4 harus membeli buku untuk mata pelajaran Matematika, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ▪ (4) Buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ▪ (5) Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <p>b) Penyelenggara Kurikulum 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (1) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah merupakan buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak. ▪ (2) Buku teks pelajaran yang dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ▪ (3) Buku yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2019	<p>a. Penyediaan buku teks utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. • 2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema. • 3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan. • 4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema. • 5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian. • 6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian. <p>b. Penyediaan buku teks pendamping</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan. • 2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran. • 3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian. <p>c. Membeli buku nonteks</p> <ul style="list-style-type: none"> • yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah sesuai dengan mekanisme PBJ Sekolah. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.

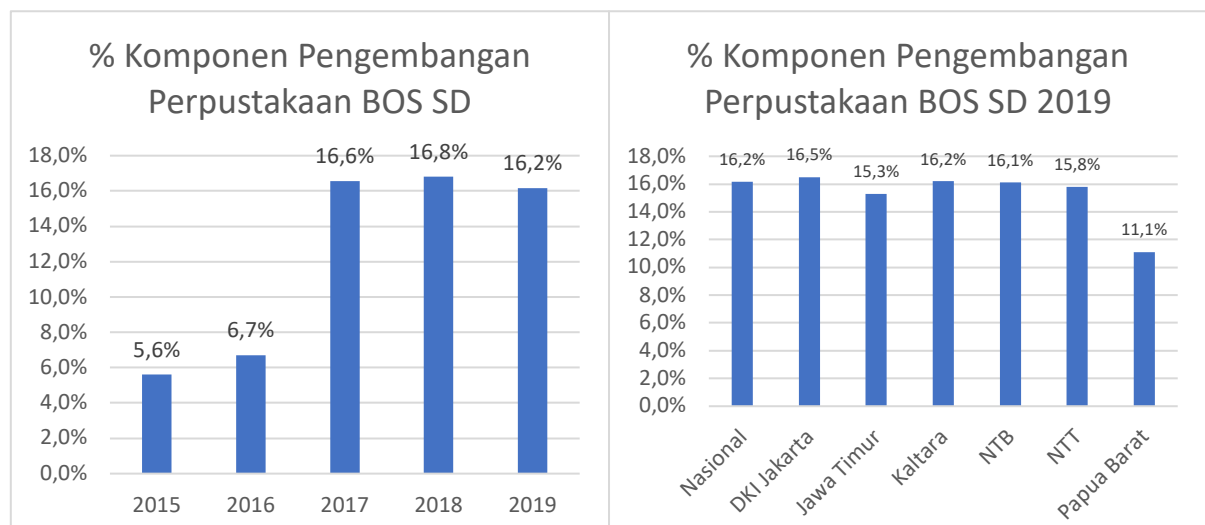
	<p>d. Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.</p> <p>e. Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan.</p> <p>f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.</p> <p>g. Pengembangan pangkalan data (<i>database</i>) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (<i>e-library</i>) atau perpustakaan digital (<i>digital library</i>).</p> <p>h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.</p> <p>i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.</p> <p>Pembelian buku teks dan buku non teks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.</p>
--	---

Melihat perkembangan dari definisi komponen pengembangan perpustakaan, kita dapat melihat bahwa Juknis secara ketat menentukan bagaimana pembelanjaan buku dilakukan.

- Juknis 2011 menyebutkan bahwa penyediaan buku SD hanya dibolehkan untuk Buku Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
- Juknis 2014 seiring dengan K13 menyebutkan bahwa buku SD hanya diperbolehkan untuk buku teks guru dan buku teks siswa K-13.
- Juknis 2017 justru membuka kemungkinan untuk penyediaan buku untuk Kurikulum 2006, dengan kelas 4 SD diutamakan untuk penyediaan Buku Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
- Juknis 2019 adalah juknis yang memberikan kelonggaran untuk penyediaan buku. Buku boleh dibeli menurut kurikulum yang digunakan dan adanya perluasan bahwa pembelian buku teks maksimal 20% dari total dana BOS reguler.

Menarik untuk melihat arah kebijakan dari Juknis 2019 yang memberikan batasan maksimal 20% dari total dana BOS reguler yang dapat digunakan untuk buku. Kebijakan maksimal ini digaungkan sebagai upaya untuk memberi ruang belanja buku terkait kebijakan untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Tetapi, ketika melihat pola belanja komponen pengembangan perpustakaan dari tahun 2015-2019, kita dapat melihat bahwa dampak dari kebijakan ini belum dilakukan secara luas oleh sekolah.

Belanja perpustakaan, mulai tahun 2017 sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 6% ke 16%, tetapi sejak itu tidak ada perubahan yang berarti. Perbandingan antar-wilayah juga menunjukkan pola yang merata. Hanya Papua Barat yang memiliki belanja komponen ini di bawah rata-rata, yaitu 11,1%.



Melihat perkembangan ini, berarti sekolah menyikapi kebijakan 20% maksimal belanja komponen perpustakaan bukan sebagai perluasan untuk mendukung program literasi, melainkan sekadar memenuhi kebutuhan buku teks. Bahkan ada kemungkinan kebijakan ini dianggap sebagai pembatasan untuk pembelian buku.

Pembayaran Tenaga Honorer

Komponen ini adalah komponen paling kontroversial dalam Juknis BOS. Sejak disalurkannya dana BOS dan dibukanya kemungkinan untuk pembiayaan personalia, yang secara legal berada di luar mandat BOS, jumlah guru honorer yang dibayar oleh sekolah langsung meningkat tajam.

Tahun	Deskripsi
2011	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD) • Pegawai perpustakaan • Penjaga Sekolah • Satpam • Pegawai kebersihan • Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun.
2016	<p>Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM); • Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk administrasi BOS untuk SD; • Pegawai perpustakaan; • Penjaga sekolah; • Petugas satpam; • Petugas kebersihan; • Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di satuan pendidikan negeri adalah 15% dari total dana BOS yang diterima, sementara di satuan pendidikan swasta adalah 30% dari total dana BOS yang diterima.
2017	<p>Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM); • Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk administrasi BOS untuk SD; • Pegawai perpustakaan; • Penjaga sekolah; • Petugas satpam; • Petugas kebersihan; • Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di satuan pendidikan negeri adalah 15% dari

	<p>total dana BOS yang diterima, sementara di satuan pendidikan swasta adalah 30% dari total dana BOS yang diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV; • bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan; dan guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2019	<p>Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer atau guru yayasan; • Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi Sekolah termasuk melakukan tugas pendataan Dapodik); • Pegawai perpustakaan; • Laboran; • Petugas UKS; • Penjaga Sekolah; • Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan; • Pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima; • Pembayaran honor bulanan guru yayasan atau tenaga kependidikan dan non-kependidikan di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima; • Guru honorer yang mendapat pembayaran honor merupakan guru honorer yang telah: <ul style="list-style-type: none"> • 1) memiliki kualifikasi akademik sarjana atau program diploma empat (S-1/D-IV); dan • 2) mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru honor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

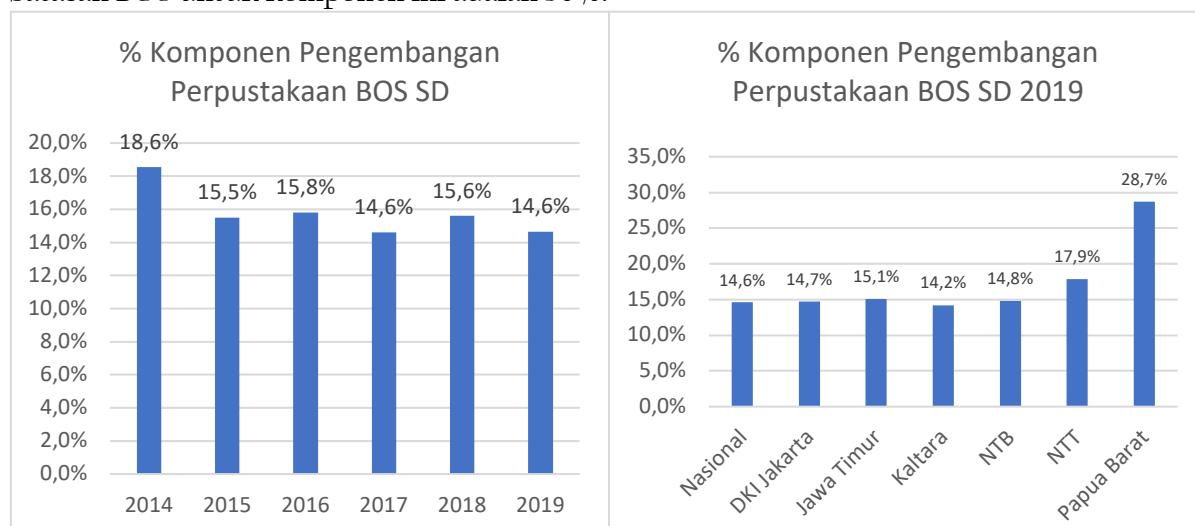
Hampir mirip dengan belanja komputer dan alat multimedia, kita dapat melihat bagaimana regulasi terus tumbuh untuk mengatur batasan belanja komponen ini.

- Dari spesifikasi awal yang hanya menggariskan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk guru dan tenaga pendidik honorer, batasan dana BOS yang dapat digunakan untuk komponen ini adalah 20%.
- Di tahun 2016, penjelasan mulai diperluas menjadi daftar posisi-posisi yang dapat diisi oleh tenaga honorer, dan kriteria tenaga honorer harus memenuhi syarat tertentu.
- Di tahun 2019, kriteria ditambah dengan perlunya penugasan dari pemerintah daerah yang memperhatikan analisis kebutuhan dan penataan guru.

Berbeda dengan belanja komponen pengembangan perpustakaan, kita dapat melihat dampak kebijakan yang lebih nyata dalam belanja komponen Pembayaran Tenaga Honorer. Pada tahun anggaran 2014, ketika Juknis BOS masih memberikan 20% batas maksimal

penggunaan dana BOS untuk pembayaran tenaga honorer, maka besaran dana BOS mengikuti batasan tersebut. Ketika batasan dana BOS dikurangi menjadi 15%, maka pergerakan BOS langsung secara otomatis mengikuti batasan tersebut.

Dalam perbandingan antar-wilayah untuk penggunaan dana BOS 2019, kita melihat konsistensi yang sama, dalam sampel data yang dikaji, hanya NTT dan Papua Barat yang berada di atas batas 20%. Hal ini dapat dijelaskan dengan komposisi sekolah swasta yang cukup dominan di dua daerah tersebut. Untuk satuan pendidikan berbasis masyarakat, batasan BOS untuk komponen ini adalah 30%.



Menelaah perkembangan Juknis BOS, peruntukannya, serta bagaimana respons satuan pendidikan terhadap regulasi tersebut, kita dapat melihat bahwa regulasi BOS dari tahun ke tahun lebih banyak disusun sebagai sebuah kebijakan yang reaktif. Belajar dari kenyataan akan respons dari satuan pendidikan, maka juknis tahun berikutnya dilakukan penyesuaian untuk menghindari penggunaan dana yang keliru.

Akan tetapi, pendekatan ini mendorong regulasi yang bersifat *patchwork* dan tidak benar-benar berusaha menanggulangi inti masalah. Pendekatan ini juga mendorong regulasi yang makin lama makin gemuk dan rumit, karena tidak akan pernah ada proses *re-thinking* dan *re-design* dari kebijakan.

Pendekatan lain yang dapat diobservasi dari pola-pola di atas adalah pendekatan yang bersifat kompromistis. Di tahun 2016, ketika BOS-SM mulai dikelola secara integratif, komponen belanja antara BOS-Dikdas dan BOS-Dikmen masih sangat berbeda. Di Juknis tahun 2017, diupayakan penyeragaman dan penataan antara komponen Dikdas dan Dikmen. Hasil yang diperoleh adalah dihapusnya komponen biaya habis pakai dan biaya untuk siswa miskin. Penghapusan biaya habis pakai masih dapat dipahami peruntukannya, tetapi keputusan untuk penghapusan biaya untuk siswa miskin adalah arah yang berlawanan dari tujuan awal dari penyaluran dana BOS, yaitu mengurangi beban biaya pendidikan pada masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Problem dalam dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari persoalan regulasi dan kebijakan yang melingkupinya. Kajian ini telah berupaya memeriksa regulasi dan kebijakan dengan mendasarkan pada temuan lapangan. Persoalan regulasi dan kebijakan dianalisis berdasarkan dampak yang dirasakan oleh para pemangku kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Melalui pendekatan yang bersifat induktif ini, regulasi didalami guna diketahui apakah terdapat persoalan yang bersifat inheren atau hanya bersifat penafsiran terhadap regulasi yang ada. Temuan persoalan dibatasi pada regulasi dan kebijakan yang berhubungan atau dapat memengaruhi kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan dasar. Dengan batasan tersebut, kajian ini fokus pada beberapa isu, yaitu kurikulum dan penilaian, pembelajaran dan guru, serta Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Pertama, persoalan kurikulum yang mengemuka salah satunya ialah kurikulum kelas awal yang tidak memberikan materi yang cukup untuk pembelajaran membaca permulaan. Guru menghadapi situasi peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda-beda, termasuk kesiapan belajarnya. Sementara itu, kurikulum tidak menyediakan materi yang memadai untuk siswa belajar menulis dan membaca permulaan. Analisis terhadap Permendikbud 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD, Permendikbud 146/2014 tentang Kurikulum 2013 untuk PAUD, dan Permendikbud No. 37/2018 tentang KI dan KD pada Kurikulum 2013 menunjukkan tidak ada persoalan mengenai keselarasan antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal. Pada kurikulum PAUD, peserta didik diharapkan mencapai kompetensi mampu menyebutkan simbol huruf, mengenal bunyi huruf, serta membaca dan menulis nama sendiri. Sementara kompetensi peserta didik kelas 1 SD diharapkan mampu membaca dan menulis sederhana.

Namun demikian, analisis lebih jauh menunjukkan bahwa kompetensi dasar pada SD kelas 1 tidak secara eksplisit menyebutkan metode atau tahapan pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Akibatnya, penyusun buku teks lebih mengedepankan materi sesuai tema daripada menyediakan materi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Terkait masalah ini, kajian ini merekomendasikan agar KI dan KD bahasa Indonesia SD/MI kelas 1 (lampiran Permendikbud No. 37/2018) agar ditinjau ulang dan memasukkan secara eksplisit pembelajaran membaca dan menulis permulaan sehingga penyusun buku teks dapat menyesuaikan kebijakan kurikulum tersebut.

Kedua, muatan kurikulum tambahan berkaitan dengan kebijakan sekolah adiwiyata, sekolah antikorupsi, dan sekolah sehat, kajian ini tidak menemukan persoalan di level regulasi, sebab muatan tambahan dapat diakomodasi baik dalam pembelajaran (masuk menjadi bagian RPP) atau melalui kegiatan ekstrakurikuler. Terkait hal ini, kami merekomendasikan perlunya sosialisasi kebijakan terkait muatan tambahan di luar kurikulum yang dapat masuk menjadi bagian dari intra dan ekstrakurikuler. Pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menentukan perlu tidaknya pelajaran muatan lokal, materi yang perlu diberikan, di kelas berapa muatan lokal diajarkan, dan hal-hal terkait dengan ini, merupakan alternatif solusi lainnya. Sekolah perlu memastikan bahwa keterampilan dasar, seperti literasi dan numerasi, benar-benar dikuasai terlebih dahulu oleh siswa.

Pada muatan lokal, kajian ini menemukan ketidaksesuaian antara Permendikbud 79/2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 dan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dua aturan ini terdapat perbedaan mengenai peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan muatan lokal. Pada Permendikbud 79/2014, penetapan muatan lokal di seluruh jenjang pendidikan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara pada UU 23/2014 (bab lampiran) penetapan muatan lokal bergantung jenjang pendidikannya (pendidikan dasar oleh

pemerintah kabupaten/kota, sementara pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi). Oleh karena itu, perlu penyelarasan dua regulasi tersebut agar lebih operasional.

Ketiga, implementasi KKM menghadapi masalah, yaitu sebagian siswa tidak mampu melampaui KKM meskipun sudah dilakukan remedi. Sebagian sekolah kemudian terpaksa “mengontrol” nilai KKM karena menganggap capaian KKM merupakan salah satu komponen dalam akreditasi sekolah. Terkait hal ini, terdapat tiga masalah, yaitu (1) unsur pembentuk KKM belum mengakomodasi keragaman dan keunikan setiap siswa; (2) remedi yang dilakukan baru sebatas *remedial test*, bukan *remedial teaching*; dan (3) asumsi yang keliru bahwa capaian KKM siswa merupakan komponen dalam akreditasi sekolah.

Berangkat dari analisis terhadap persoalan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan: (1) perlu dikaji lebih jauh mengenai unsur pembentuk KKM (Permendikbud No. 23/2016 Pasal 1 angka 6) dengan mempertimbangkan potensi masing-masing peserta didik sebelum dan sesudah proses pembelajaran, serta mengembalikan pengukuran nilai pada KD di jenjang SD; selain itu, diperlukan pula instrumen penilaian adaptif yang dapat membantu guru melakukan penilaian dengan baik; (2) menegaskan pada buku *Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor SD* bahwa pelaksanaan remedi perlu ditekankan pada *remedial teaching* yang terprogram, di mana guru melakukan diagnosis kesulitan belajar siswa, kemudian memberikan bimbingan dan tambahan pembelajaran; (3) perlu sosialisasi mengenai KKM sebagai komponen akreditasi sesuai Permendikbud 002/H/AK/2017 tentang Perangkat Akreditasi SD/MI bahwa jumlah siswa yang melampaui KKM bukan merupakan syarat akreditasi sehingga tidak terjadi salah tafsir.

Keempat, pada proses pembelajaran terdapat tiga isu yang muncul, yaitu (1) pendekatan taksonomi pada lampiran Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses dapat menjadi justifikasi bagi guru untuk fokus pada aspek mengingat yang dianggap lebih mudah dan dianggap prasyarat untuk aspek yang lebih tinggi; (2) RPP terlalu tebal dan karena itu sering kali dikerjakan dengan teknik salin-tempel; (3) serta kebijakan jumlah Rombel untuk SD yang berkisar 6-24 kelas tidak mengakomodasi kemungkinan penyelenggaraan *multigrade* pada wilayah dengan jumlah peserta didik minim.

Berangkat dari analisis tersebut, maka kajian ini merekomendasikan: (1) perlu kajian lebih lanjut untuk meninjau ulang pendekatan taksonomi baik secara konsep maupun implementasinya; (2) Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran RPP satu halaman, namun hal ini perlu didukung dengan merevisi Permendikbud 22/2016 yang mensyaratkan RPP harus terdiri dari 13 komponen; serta (3) merevisi aturan dan/atau menambah catatan terkait regulasi rombel untuk membuka kemungkinan pendekatan *multigrade* di sekolah yang memerlukan.

Kelima, berkenaan dengan guru terdapat beberapa persoalan, yaitu (1) ketentuan harus “sehat jasmani dan rohani” dalam PP No. 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat menyebabkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas; (2) indikator kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam Permendiknas 16/2007 cenderung menggunakan pendekatan teoretis (menguasai teori belajar, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan) dan kurang memperhatikan kompetensi guru dalam memahami kondisi siswa yang beragam, serta penguasaan guru terhadap metode dan materi pembelajaran di kelas; (3) penilaian guru tidak dilaksanakan secara objektif dan hanya didasarkan pada pemenuhan administrasi; (4) administrasi yang membebani guru, baik yang terkait dengan pembelajaran (RPP dan rapor *online*) maupun non-pembelajaran (administrasi kenaikan pangkat, TPG, dan sebagai bendahara BOS).

Hasil analisis terhadap persoalan guru tersebut mengantarkan pada beberapa rekomendasi, antara lain: (1) perlu mengkaji ulang PP 19/2015, khususnya Pasal 28 agar sesuai dengan PP 70/2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; (2) penguatan kapasitas guru di dalam jabatan⁸ di mana kurikulum program peningkatan pembelajaran (PKP) dipetakan berdasarkan kurikulum program profesi guru (PPG) sehingga bisa dilaksanakan secara lebih efisien dan koheren; (3) meninjau kembali Permendikbud 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru agar penilaian terhadap guru lebih bersifat substantif, serta tunjangan profesi guru tidak diberikan otomatis, melainkan disesuaikan dengan kompetensi dan capaian kinerja; (4) terkait beban administrasi pembelajaran, penyederhanaan RPP perlu diikuti dengan penyederhanaan dalam Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses; (5) untuk beban administrasi non-pembelajaran, maka perlu menyelaraskan regulasi antara Permendikbud 6/2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 971-7791 Tahun 2018 yang mengatur bendahara BOS.

Keenam, hasil analisis terhadap petunjuk teknis BOS dari 2014 – 2019 menunjukkan bahwa regulasi tersebut lebih banyak disusun sebagai kebijakan yang reaktif. Regulasi yang ada bersifat tambal sulam (*patchwork*) dan tidak benar-benar berusaha menanggulangi inti masalah pendanaan pendidikan. Regulasi yang tambal sulam juga mendorong aturan yang makin lama kian rinci dan rumit.

Simpulan dan saran rekomendasi di atas secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Ringkasan Temuan dan Rekomendasi

No	Isu	Temuan	Regulasi Terkait	Rekomendasi
1.	Kurikulum Kelas Awal	<ul style="list-style-type: none"> Buku teks siswa tidak memberikan materi yang cukup bagi siswa untuk belajar membaca dan menulis permulaan 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud No. 37/2018 tentang KI dan KD pada Kurikulum 2013, khususnya pada lampiran kompetensi bahasa Indonesia kelas 1 SD. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisi KD agar secara eksplisit menyebutkan tahapan pembelajaran membaca dan menulis permulaan Revisi buku teks
2.	Beban Muatan Tambahan dan Muatan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Sekolah merasa terbebani dengan muatan tambahan (sekolah adiwiyata, antikorupsi, sehat, dll) dan muatan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 57/2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI Permendikbud 35/2018 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kebijakan mengenai muatan tambahan yang dapat masuk menjadi bagian dari intra dan ekstrakurikuler
		<ul style="list-style-type: none"> Persoalan kewenangan menetapkan muatan lokal antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 79/2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelaraskan Permendikbud 79/2014 dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Mereview kembali Permendikbud dan mendorong pemberian wewenang kepada sekolah untuk membuat kebijakan terkait muatan lokal
3.	KKM	<ul style="list-style-type: none"> Unsur pembentuk KKM, yaitu <i>intake</i>, kompleksitas mata 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji lebih jauh unsur pembentuk KKM dengan

⁸ Sementara itu, KKG/KKKS/MGMP tidak berada dalam struktur Dinas Pendidikan di kabupaten/kota.

		pelajaran, dan daya dukung sekolah belum mengakomodasi keragaman dan keunikan setiap siswa		mempertimbangkan potensi masing-masing peserta didik sebelum dan sesudah proses pembelajaran; khusus di SD penilaian perlu merujuk pada KD
		<ul style="list-style-type: none"> Remedi yang dilakukan umumnya <i>remedial test</i>, bukan <i>remedial teaching</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Buku <i>Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor SD</i> (Dit. Pembinaan SD 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu merevisi dan menekankan <i>remedial teaching</i> yang terprogram terutama pada <i>Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor SD</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Asumsi bahwa jumlah peserta didik yang melampaui KKM merupakan indikator akreditasi sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud No. 002/H/AK/2017 tentang Perangkat Akreditasi SD/MI 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kedudukan KKM dalam akreditasi agar tidak terjadi salah tafsir
4.	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan taksonomi dapat menjadi justifikasi guru untuk fokus pada aspek mengingat yang dianggap lebih mudah dan dianggap prasyarat aspek yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu meninjau ulang taksonomi tersebut baik secara konsep maupun implementasinya
		<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dianggap terlalu rumit dan karena itu sering kali dikerjakan dengan teknik <i>salin-tempel</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan RPP satu halaman perlu diikuti dengan revisi Permendikbud 22/2016 yang menyebutkan 13 komponen minimal
		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan jumlah rombel berkisar antara 6-24 kelas tidak membuka peluang pendekatan <i>multigrade</i> untuk sekolah dengan peserta didik minim 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses 	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Permendikbud 22/2016 untuk membuka peluang pendekatan <i>multigrade</i>
5	Guru	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan bahwa guru harus “sehat jasmani dan rohani” dapat menyebabkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> PP 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 	<ul style="list-style-type: none"> Kaji ulang PP 19/2015, khususnya Pasal 28 agar tidak bertentangan dengan PP 70/2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
		<ul style="list-style-type: none"> Indikator kompetensi pedagogik dan profesional guru cenderung menggunakan pendekatan teoretis dan kurang memperhatikan penguasaan guru terhadap metode pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas guru di dalam jabatan, melalui program profesi guru (PPG) Merevisi Permendiknas 16/2007 agar aspek yang harus dipetakan oleh guru terkait kemampuan siswa adalah aspek-

		<ul style="list-style-type: none"> Penerapan dari persyaratan kompetensi pedagogi guru untuk memetakan kemampuan siswa dari berbagai aspek 		<p>aspek yang realistis bisa dilakukan oleh guru dan berdampak pada kemampuan belajar siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan atau adaptasi instrumen pemetaan kemampuan siswa. Instrumen ini juga perlu bersifat adaptif agar sesuai dengan konteks lokal Melakukan kajian lanjutan terkait dengan program LPTK dalam menyiapkan calon guru untuk memastikan calon guru memiliki kapasitas membangun kemampuan dasar siswa di kelas awal
		<ul style="list-style-type: none"> Penilaian guru cenderung tidak objektif dan mengarah pada pemenuhan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru 	<ul style="list-style-type: none"> Tinjau kembali Permendikbud 35/2010; dan tunjangan profesi guru tidak bersifat otomatis, namun disesuaikan dengan kompetensi dan capaian kinerja guru
		<ul style="list-style-type: none"> Beban administrasi guru terkait pembelajaran (RPP, KKM, serta rapor manual dan <i>online</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses 	<ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan RPP perlu diikuti dengan revisi Permendikbud 22/2016
		<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan pangkat dan pengurusan TPG dibebani pemberkasan berulang dan hanya memenuhi administrasi, bukan proses dan capaian guru 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru 	<ul style="list-style-type: none">
		<ul style="list-style-type: none"> Guru ditugaskan sebagai bendahara BOS karena tidak ada tenaga administrasi PNS di jenjang SD 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mendagri No. 971-7791 Tahun 2018 mengatur bahwa Bendahara BOS harus dari unsur PNS Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Permendikbud 6/2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Meninjau ulang dan menyelaraskan Surat Edaran Mendagri No. 971-7791 Tahun 2018, Permendikbud 15/2018, dan Permendikbud 6/2019

6	Pendanaan Pendidikan (BOS)	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi BOS 2014 – 2019 memuat substansi kebijakan yang sangat kompleks dan disusun secara reaktif, sehingga menjadi terlalu rumit dalam implementasinya. 	<ul style="list-style-type: none"> Permendikbud tentang Juknis BOS 	<ul style="list-style-type: none"> Juknis BOS perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pendidikan secara makro, sehingga tidak terjebak dengan hal-hal yang terlalu teknis dan rumit. Misalnya, jika fokus kebijakan pendidikan adalah pembinaan kualitas dan inovasi pembelajaran, maka sekolah perlu diberikan keleluasaan dalam mengelola BOS sehingga BOS dapat memfasilitasi realisasi berbagai program inovatif yang beragam di sekolah-sekolah.
---	----------------------------	--	---	---

DAFTAR PUSTAKA

- ACDP. 2016. *Kajian Cepat Kurikulum 2013 dan Buku Teks Pelajaran*. Jakarta: Kemitraan Analisis dan Pengembangan Kapasitas, Balitbang, Kemendikbud.
- ACDP. 2017. *Reformasi Kurikulum*. Jakarta: Kemitraan Analisis dan Pengembangan Kapasitas, Balitbang, Kemendikbud.
- Al-Samarrai, S., Fasih, T., Hasan, A., & Syukriyah, D. 2014. *Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia*. The World Bank Report, No. AUS413.
- Baedowi, Ahmad. 2015. *Calak Edu 4: Esai-Esai Pendidikan 2012-2014*. Pustaka Alvabet: Jakarta
- Case, R. 2013. "The unfortunate consequences of Bloom's taxonomy." *Social Education*, 77(4), 196-200.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. 2014. *Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor SD*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar, Kemendikbud.
- Gray, Peter. (2011). *Freedom to Learn: The Roles of Play and Curiosity as Foundations for Learning*. Freedom to Learn.
- Hernandez, D. 2011. *Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation*. New York, USA: The Annie E. Casey Foundation.
- Horn, Michael. 2011, Juli 29. *Why Public Schools Need Less Regulation*. Tulisan pada <https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/07/why-public-schools-need-less-regulation/242590/>
- jpp.go.id. Juli 25, 2018. "Agar Bisa Berkembang, Seskab: Mata Pelajaran untuk Anak Jangan Terlalu Banyak". <https://jpp.go.id/humaniora/pendidikan/335091-agar-bisa-berkembang-seskab-mata-pelajaran-untuk-anak-jangan-terlalu-banyak>
- Kesuma, Ratna, dkk. 2018. *Efficient Deployment of Teachers: A Policy Note*. The World Bank
- kompasiana.com. Agustus 20, 2014. "Penyaluran Dana BOS yang Tidak Merata". <https://www.kompasiana.com/balqisisna/54f5f923a3331184118b45e2/penyaluran-dana-bos-yang-tidak-merata>
- Little, A. W. 2001. "Multigrade Teaching: Towards an International Research and Policy Agenda". *International Journal of Educational Development*, 481-497.
- OECD. 2012. *OECD Reviews of Regulatory Reform: Indonesia 2012: Strengthening Coordination and Connecting Markets*, OECD Publishing. <https://dx.doi.org/10.1787/9789264173637-en>
- Pratama dan Arsendy. 2016. *Laporan Rapid Assessment. Beban Administrasi: Perspektif Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas*. Tim Staf Khusus Mendikbud Bidang Tata Kelola, Kemendikbud.
- Pusat Penilaian Pendidikan. 2018. *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari PISA 2018*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud.
- rand.org. "Teachers Matter: Understanding Teachers' Impact on Student Achievement". Artikel dalam: <https://www.rand.org/education-and-labor/projects/measuring-teacher-effectiveness/teachers-matter.html>
- Sahlberg, P. 2006. "Education Reform for Raising Economic Competitiveness". *Journal of Educational Change*, 7(4), 259-287. <https://doi.org/10.1007/s10833-005-4884-6>
- Sandra Kurniawati, Daniel Suryadarma, Luhur Bima and Asri Yusrina. 2018. "Education in Indonesia: A White Elephant?" *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 2, Special Issue: The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond (August 2018), pp. 185-199.
- SMERU. 2006. *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005*. Jakarta.

- Suatan, Priscillia. 2019. *Studi Ketersediaan dan Akses Bacaan yang Relevan bagi Siswa Kelas Awal di Sekolah Pilot INOVASI Kalimantan Utara*. Jakarta: INOVASI.
- Unit Layanan Terpadu. 2017. *Capaian Kinerja Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Melayani Masyarakat Januari – Desember 2017*. Jakarta: Kemendikbud.
- Unit Layanan Terpadu. 2018. *Capaian Kinerja Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Januari – Desember 2018*. Jakarta: Kemendikbud.
- Unit Layanan Terpadu. 2019. *Laporan Unit Layanan Terpadu 2019*. Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemendikbud.
- USAID Prioritas. Maret 4, 2016. “Keuntungan dari Penataan dan Pemerataan Guru yang Lebih Efisien”. <https://prioritaspendidikan.org/id/media/view/detail/575/-keuntungan-dari-penataan-dan-pemerataan-guru-yang-lebih-efisien>
- Ischak, S.W. dan Warji. 1987. *Program Remedial dalam Proses Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Liberty.
- World Bank. 2018a. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise* (WDR 2018). Washington, DC: World Bank.
- . 2018b. *Tumbuh Lebih Cerdas: Pembelajaran dan Pembangunan Merata di Asia Timur dan Pasifik*. Washington, DC: World Bank.
- . 2018c. *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Pendidikan untuk pertumbuhan*. Washington, DC: World Bank.
- Zieky, Michael dan Perie, Marianne. 2006. *A Primer on Setting Cut Score on Test of Educational Achievement*. ETS.

Lampiran 1. Rincian Beban Kerja Guru

Berdasarkan Permendikbud 15/2018, berikut adalah rincian beban kerja guru:

Tabel 1: Ringkasan rincian beban kerja guru

Item	Rincian tugas	Catatan
Merencanakan pembelajaran	Meliputi: a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran b. pengkajian program tahunan dan semester c. pembuatan RPP	
Melaksanakan pembelajaran	Pelaksanaan RPP	Minimal 24 dan maksimal 40 jam tatap muka/minggu
Menilai hasil belajar	Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur capaian hasil belajar	Aspek yang diukur adalah sikap, pengetahuan dan keterampilan
Membimbing dan melatih peserta didik	Melaksanakan kegiatan kokurikuler dan/atau kurikuler	
Melaksanakan tugas tambahan	Meliputi: a. wakil kepala sekolah b. ketua program keahlian c. kepala perpustakaan d. kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi/teaching factory e. pembimbing khusus di sekolah inklusi atau sekolah terpadu f. tugas tambahan lain	Point a-d ekuivalen dengan 12 jam tatap muka/minggu Point e ekuivalensi dengan 6 jam tatap muka/minggu
	Tugas tambahan lain meliputi: a. wali kelas b. pembina OSIS c. pembina ekstrakurikuler d. coordinator PKB/PKG e. guru piket f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama g. penilai kinerja guru h. pengurus organisasi/asosiasi profesi guru i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Bisa dihitung sebagai jam tatap muka, max 6 jam/minggu Point ekuivalensi: Point a- d: 2 jam/minggu Point e dan f: 1 jam/minggu Point g: 2 jam/minggu Point h: 1-2-3 jam/minggu untuk kab/kota-provinsi-nasional Point i: sesuai peraturan perundang-undangan
Rincian tugas kepala sekolah	a. manajerial b. pengembangan kewirausahaan c. supervisi guru dan tenaga kependidikan	
Rincian tugas pengawas sekolah	a. pengawasan b. pembimbingan c. pelatihan profesional untuk guru d. merencanakan, mengevaluasi, melaporkan hasil pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan terhadap guru dan kepala sekolah	
Guru, kepala sekolah, pengawas	Wajib melaksanakan PKB (di sekolah atau di luar sekolah)	Dihitung sebagai pemenuhan beban kerja 37.5 jam
Guru	Tugas kedinasan oleh dinas/kepala sekolah	Dihitung pemenuhan beban kerja 37.5

Lampiran 2. Contoh RPP Sederhana

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Model Format RPP Sesuai Surat Edaran Kemendikbud No. 14 Tahun 2019

Sekolah	: SDN NGAMPELSARI
T e m a	: 5-Pengalamanku
Sub Tema	: 1-Pengalaman Masa Kecil
Pembelajaran	: 1 (Satu)
Kelas/Semester	: I (Satu) / II (Genap)
Tahun Pelajaran	: 2019/2020
Materi Pokok	:
Alokasi Waktu	: 6 x 35 Menit

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan mendengarkan lagu bertempo cepat, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sebuah lagu yang memiliki ketukan cepat dengan tepat dan percaya diri.
2. Dengan mendengarkan lagu bertempo lambat, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sebuah lagu yang memiliki ketukan lambat dengan tepat dan percaya diri.
3. Dengan melakukan gerak berjalan di tempat, siswa dapat mempraktikkan lagu "Burung Kakaktua" bertempo cepat dengan benar dan percaya diri.
4. Dengan melakukan gerak berjalan di tempat, siswa dapat mempraktikkan lagu "Burung Kakaktua" bertempo lambat dengan benar dan percaya diri.
5. Dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan ungkapan pemberian pujian dengan tepat.
6. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian secara lisan dengan tepat.
7. Dengan menyalin contoh kalimat pujian, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat.
8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat.
9. Dengan mengamati poster berisi teks Pancasila, siswa dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan benar.
10. Dengan menirukan teks Pancasila yang diucapkan oleh guru, siswa mengetahui rumusan sila-sila Pancasila dengan tepat.
11. Dengan bermain menyusun kalimat yang terdapat pada sila kedua Pancasila, siswa dapat menyebutkan rumusan sila kedua Pancasila dengan tepat.
12. Dengan mengamati intonasi dan cara membaca Pancasila dari berbagai sumber, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila kedua Pancasila dengan benar.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

2.1. Alat dan Bahan

2.1.1. Alat :

- Alat musik seperti gitar (jika memiliki keterampilan bermain gitar).
- Rekaman berupa contoh lagu "Burung Kakaktua" (atau dapat dinyanyikan oleh guru).
- Teks lagu "Burung Kakaktua" sebagai panduan bagi siswa dalam menyanyikannya.
- Buku siswa.
- Poster Teks Pancasila.

2.1.2. Bahan :

- Buku Guru Tematik Kelas I Edisi Revisi 2017
- Buku Siswa Tematik Kelas I Edisi Revisi 2017

2.1.3. Pertanyaan

- Tanyakan kepada siswa apakah mereka mendengar ungkapan pujian dari cerita yang telah disampaikan? Sampaikan pula pada siswa bahwa pujian adalah bentuk apresiasi terhadap hal positif yang telah dilakukan.

2.2. Siswa berlatih praktik /mengerjakan tugas

- Guru membuka pelajaran dengan menyanyikan lagu “Bunda Piara” sambil bermain gitar. Sebagai alternatif kegiatan, guru dapat memperdengarkan rekaman lagu “Bunda Piara”.
- Tanyakan kepada siswa apakah mereka mengenal lagu tersebut atau tidak.
- Ajak siswa untuk menyanyikan lagu berikutnya, “Burung Kakaktua”, bersama-sama untuk membangun semangat dan motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan belajar.
- Guru memainkan lagu dengan ketukan lambat dan cepat secara bergantian.
- Siswa diminta berdiri bersama-sama dan melakukan gerakan berjalan di tempat sesuai lagu yang dimainkan atau dinyanyikan oleh guru.
- Setelah beberapa kali melakukan gerakan cepat maupun lambat sesuai dengan tempo lagu, ajak siswa kembali duduk dan berdiskusi bersama.
- Tanyakan kepada siswa apa yang mereka rasakan saat melakukan gerakan mengikuti musik yang dimainkan oleh guru.
- Berikan kesempatan pada beberapa siswa untuk menyampaikan pendapatnya.
- Ajak siswa menyimpulkan hasil diskusi secara bersama-sama.
- Jelaskan mengenai makna dari tempo pada sebuah lagu.
- Bagi siswa menjadi beberapa kelompok.
- Siapkan gulungan kertas bertuliskan cepat atau lambat.
- Minta perwakilan kelompok untuk mengambil gulungan kertas dan menyanyikan lagu “Burung Kakaktua” dengan tempo sesuai yang tertera di kertas, apakah ketukan cepat atau lambat.
- Kelompok siswa yang belum memperoleh giliran diminta mengamati ketepatan tempo dari lagu yang tengah dinyanyikan.
- Lakukan sampai semua kelompok memperoleh giliran bernyanyi.
- Berikan apresiasi pada kelompok siswa yang telah menyanyikan lagu “Burung Kakaktua” sesuai tempo yang diminta.

Ayo Mengamati

- Guru membacakan cerita yang berkaitan dengan pujian (cerita dapat dibuat berdasarkan kreativitas guru).
- Pada saat membacakan cerita, berikan penekanan pada bagian yang berisi ungkapan pujian.
- Selesai bercerita, lakukan tanya jawab dengan siswa mengenai isi dari cerita yang telah dibacakan.
- Tanyakan kepada siswa apakah mereka mendengar ungkapan pujian dari cerita yang telah disampaikan? Sampaikan pula pada siswa bahwa pujian adalah bentuk apresiasi terhadap hal positif yang telah dilakukan.
- Diskusikan bersama dengan siswa mengenai ungkapan-ungkapan yang dapat disampaikan saat memberikan apresiasi kepada orang lain.
- Perlihatkan kartu bergambar kepada siswa, lalu minta siswa memberikan contoh ungkapan pujian.
- Lakukan beberapa kali ulangan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai kalimat pujian.

2.3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok/individu

Ayo Mengamati

- Siswa diminta mengamati gambar garuda yang terdapat di ruang kelas.
- Tanyakan pada siswa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pancasila, misalnya ada berapakah sila dalam pancasila.
- Tanyakan kembali kepada siswa apakah mereka sudah hafal Pancasila atau belum.

2.4. Menyimpulkan dan Penilaian Pembelajaran

2.4.1. Kesimpulan Pembelajaran

- Siswa diminta menyalin contoh kalimat atau ungkapan pujian yang terdapat dalam buku siswa.
- Selain itu, siswa diminta menulis kalimat pujian berdasarkan pengalaman yang telah mereka alami di waktu kecil.
- Tunjukkan kepada siswa potongan-potongan kata (berukuran besar) dari sila ke-2 Pancasila.
- Acak kartu tersebut dan minta siswa menyusun kembali bunyi dari sila ke-2 Pancasila.
- Setelah tersusun sesuai bunyi sila kedua, siswa diminta membaca bunyinya dengan lantang.

2.4.2. Penilaian

1. Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan (lihat pedoman penilaian).
2. Penilaian Pengetahuan
 - Tes tertulis mengenai ungkapan pujian berdasarkan gambar
 - Tes lisan mengenai bunyi sila kedua dari Pancasila
 - Ajak siswa untuk membaca Pancasila bersama-sama.
 - Selesai membacakan bunyi dari Pancasila, ajak siswa mengamati bunyi sila kedua.
3. Penilaian Keterampilan

Mengetahui,
Kepala

Ngampelsari,

Guru Kelas I,

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Model Format RPP Sesuai Surat Edaran Kemendikbud No. 14 Tahun 2019

Sekolah	: SDN NGAMPELSARI
T e m a	: 5-Pengalamanku
Sub Tema	: 1-Pengalaman Masa Kecil
Pembelajaran	: 2 (Dua)
Kelas/Semester	: I (Satu) / II (Genap)
Tahun Pelajaran	: 2019/2020
Materi Pokok	:
Alokasi Waktu	: 6 x 35 Menit

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan mengamati contoh gerak saling mendorong yang diperagakan oleh guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak bertumpu pada tangan dengan runtun dan percaya diri.
2. Setelah melakukan latihan dalam kelompok, siswa dapat mempraktikkan gerak saling mendorong secara tepat.
3. Setelah mengamati dan mendengarkan percakapan yang dibacakan, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian secara lisan dengan benar.
4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengungkapkan kalimat pujian dengan tepat.
5. Setelah membaca teks sederhana tentang pujian, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat.
6. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

2.1. Alat dan Bahan

2.1.1. Alat :

- Buku siswa
- Kartu bergambar kegiatan yang dapat mengungkapkan pujian.

2.1.2. Bahan :

Buku Guru Tematik Kelas I Edisi Revisi 2017
Buku Siswa Tematik Kelas I Edisi Revisi 2017
Silabus Kelas I Edisi Revisi
Buku Lain yang Relevan

2.1.3. Pertanyaan

- Tanyakan kepada siswa apakah mereka dapat menemukan ungkapan pujian dari percakapan yang telah dibacakan?

2.2. Siswa berlatih praktik /mengerjakan tugas

- Siswa diminta duduk bersama-sama membentuk lingkaran untuk bermain latihan konsentrasi.
- Guru membacakan cerita yang mengandung kata "Hitam" dan "Hijau".
- Jika guru menyebutkan hitam, siswa harus jongkok. Jika kata yang disebutkan adalah hijau, siswa harus berdiri.
- Siswa diminta menirukan gerak yang telah dilakukan guru secara bersama-sama.
- Ulangi beberapa putaran.

Ayo Mencoba

- Guru bertanya kepada siswa mengenai sikap bertumpu dan bergantung yang mereka ketahui.
- Berikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan.

- Sampaikan kepada siswa, posisi saling mendorong dengan bertumpu pada tangan merupakan salah satu latihan kekuatan.
- Minta salah seorang siswa menjadi contoh dalam melakukan gerakan saling mendorong bersama dengan guru.
- Peragaan gerak saling mendorong dihadapan siswa.
- Guru mengoreksi jika ada kekeliruan-kekeliruan siswa dalam melakukan gerakan tersebut.
- Setelah berlatih melakukan gerak senam dasar bertumpu pada tangan, catat kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang dimaksud.
- Akhiri kegiatan olahraga dengan melakukan pendinginan dan meminta siswa berganti pakaian.
- Guru membuka kegiatan dengan mengapresiasi kerja sama siswa saat melakukan proses olahraga dengan menggunakan ungkapan pujian.
- Guru meminta perwakilan siswa membaca percakapan yang terdapat dalam buku siswa.
- Siswa yang lain diminta mengamati percakapan yang tengah berlangsung.
- Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai ungkapan pujian dan menyampaikan pendapat mereka mengenai cara mengungkapkan pujian.
- Tunjukkan kartu bergambar kepada siswa dan berikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mengenai ungkapan pujian yang sesuai dengan isi gambar.
- Lakukan beberapa kali.

2.3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok/individu

- Siswa diminta menuliskan ungkapan pujian yang sesuai dengan gambar yang terdapat dalam buku siswa.

2.4. Menyimpulkan dan Penilaian Pembelajaran

2.4.1. Kesimpulan Pembelajaran

Sebagai kegiatan penutup, guru memimpin diskusi kelas dan membantu siswa dalam membuat kesimpulan besar tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari tersebut. Siswa diminta untuk merefleksikan:

1. Pengetahuan apa yang dipelajari siswa pada hari ini?
2. Keterampilan apa yang siswa latih pada hari ini?
3. Sikap apa yang siswa kembangkan pada hari ini?

2.4.2. Penilaian

1. Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan (lihat pedoman penilaian).
2. Penilaian Pengetahuan
 - Tes tertulis mengenai ungkapan pujian dari gambar atau teks bacaan yang diberikan
3. Penilaian Keterampilan
 - Melakukan sikap saling mendorong dengan bertumpu pada tangan
 - Menulis ungkapan pujian

Mengetahui,
Kepala

Ngampelsari,

Guru Kelas I,

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Model Format RPP Sesuai Surat Edaran Kemendikbud No. 14 Tahun 2019

Sekolah	: SDN NGAMPELSARI
T e m a	: 5-Pengalamanku
Sub Tema	: 1-Pengalaman Masa Kecil
Pembelajaran	: 3 (Tiga)
Kelas/Semester	: I (Satu) / II (Genap)
Tahun Pelajaran	: 2019/2020
Materi Pokok	: Menyatakan pujian secara lisan.
Alokasi Waktu	: 6 x 35 Menit

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. membilang banyak benda sebanyak 21 sampai dengan 40 secara urut.
2. mengelompokkan benda sesuai bilangan yang diberikan dari 21 sampai dengan 40.
3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan simbol sila kedua dengan tepat.
4. Dengan membuat bentuk rantai dari kertas lipat, siswa dapat menunjukkan simbol sila kedua dengan benar.
5. Dengan mengamati simbol-simbol dari sila Pancasila, siswa dapat menuliskan kembali bunyi sila kedua Pancasila.
6. Setelah mengamati teks bacaan tentang sikap saling-menolong, siswa dapat menyebutkan ungkapan pujian dengan tepat.
7. Dengan mengamati bentuk rantai hasil karya teman, siswa dapat mengungkapkan pujian secara lisan dengan tepat.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

2.1. Alat dan Bahan

2.1.1. Alat :

- Buku siswa.
- Disediakan berbagai benda di sekitar sekolah seperti tutup botol, pensil, bolpoint, dan sebagainya sebanyak 40.
- Benda-benda seperti bola plastik, permen, dan stik es krim sebanyak 40 buah.
- Poster simbol-simbol sila Pancasila.
- Kertas lipat yang sudah dibentuk menjadi rantai sebagai contoh bagi siswa.

2.1.2. Bahan :

Buku Guru Tematik Kelas I Edisi Revisi 2017
Buku Siswa Tematik Kelas I Edisi Revisi 2017
Silabus Kelas I Edisi Revisi
Buku Lain yang Relevan

2.1.3. Pertanyaan

- Tanyakan kepada siswa hal apa saja yang diketahui siswa tentang rantai?

2.2. Siswa berlatih praktik /mengerjakan tugas

Ayo Berlatih

- Minta siswa membilang benda sebanyak 21 sampai dengan 40 dengan bantuan gambar.
- Siswa juga dapat berlatih mengelompokkan benda sesuai bilangan yang diberikan melalui gambar yang terdapat dalam buku siswa.

Ayo Mengamati

- Guru menunjukkan rantai dari kertas kepada siswa.
- Siswa dan guru bersama-sama menghitung banyak cincin yang terdapat pada rantai.
- Tanyakan kepada siswa hal apa saja yang diketahui siswa tentang rantai?
- Arahkan dan kaitkan jawaban-jawaban siswa dengan lambang dari Pancasila.
- Tunjukkan poster lambang-lambang pancasila pada siswa.
- Perlihatkan poster bergambar rantai sebagai lambang dari sila kedua Pancasila.
- Beri kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi bentuk dan banyak cincin yang terdapat pada rantai.





Ayo Mengamati

- Setelah membuat rantai, siswa diminta membaca teks pada buku siswa tentang tolong-menolong.
- Lakukan diskusi dengan siswa mengenai sikap tolong-menolong yang merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila.
- Tanyakan kepada siswa apakah sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji.
- Minta salah satu siswa memberikan contoh ungkapan pujian atas peristiwa yang telah dibaca pada teks.
- Guru menunjukkan salah satu rantai kertas yang telah dibuat siswa dan memberikan pujian.
- Bagikan rantai secara acak kepada siswa dan minta siswa untuk mengungkapkan pujian secara lisan dari rantai kertas yang mereka pegang.

2.3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok/individu

Ayo Mencoba

- Ajak siswa membuat rantai kertas agar siswa dapat menunjukkan lambang sila kedua Pancasila.
Langkah-langkah membuat rantai kertas sebagai berikut.

	
1. Potong kertas memanjang	2. Buat kertas berbentuk cincin, lalu rekatkan
	
3. Buat cincin berikutnya dengan mengaitkan dalam cincin pertama	4. Gabungkan ujung rantai dengan ujung lainnya

2.4. Menyimpulkan dan Penilaian Pembelajaran

2.4.1. Kesimpulan Pembelajaran

Sebagai kegiatan penutup, guru memimpin diskusi kelas dan membantu siswa dalam membuat kesimpulan besar tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari tersebut. Siswa diminta untuk merefleksikan:

1. Pengetahuan apa yang dipelajari siswa pada hari ini?
2. Keterampilan apa yang siswa latih pada hari ini?
3. Sikap apa yang siswa kembangkan pada hari ini?

2.4.2. Penilaian

1. Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan (lihat pedoman penilaian).
2. Penilaian Pengetahuan
 - Tes tertulis membilang benda sebanyak 21 sampai 40 dan mengelompokkan benda sebanyak 21 sampai 40.
 - Tes lisan : menyebutkan dan menunjukkan lambang sila kedua Pancasila.

Mengetahui,
Kepala

NIP.

Ngampelsari,

Guru Kelas I,

NIP.

Lampiran 3. Instrumen Profil Belajar Siswa

INSTRUMEN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS)

Instrumen Profil Belajar Siswa (PBS) harus dilengkapi oleh guru secara bersama-sama dengan orang tua/wali siswa, beserta pihak terkait lainnya (Kepala Sekolah, Guru Pembimbing Khusus, Pengawas, Terapis, dll). Jika diperlukan, siswa juga dapat dilibatkan dalam pengisian formulir PBS ini.

Instrumen PBS dimulai dengan pengisian data pribadi siswa dan guru dan/atau pihak lainnya yang dilibatkan dalam proses tersebut. Secara singkat, PBS terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

A. Identifikasi Disabilitas

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan guru dan pihak lainnya, kesulitan siswa diidentifikasi menurut berbagai aspek fungsional yang mencakup: Penglihatan, Pendengaran, Motorik Kasar, Motorik Halus, Berbicara, Intelektual, Belajar Spesifik, Perilaku/Perhatian/Sosialisasi, dan Emosi.

B. Alat Bantu Khusus

Di bagian ini, guru dan pihak lainnya mengidentifikasi apakah siswa membutuhkan alat bantu seperti kacamata, alat bantu dengar, kursi roda, kruk/tongkat, alat tulis braille, dan sebagainya.

C. Pergerakan di Lingkungan Sekolah

Di bagian ini, guru dan pihak lainnya mengidentifikasi penyesuaian bangunan yang dibutuhkan siswa seperti ramp/tanjakan landai, handrail/pegangan, guiding block/lantai pemandu dan sebagainya.

D. Kelebihan/Kemampuan Siswa

Di bagian ini, diidentifikasi apa saja potensi, prestasi dan keaktifan siswa dalam belajar.

E. Dukungan yang dibutuhkan dalam pembelajaran

Di bagian ini, diidentifikasi sejauhmana pendampingan yang dibutuhkan siswa dibandingkan kawan seusianya, misalnya dalam proses belajar, komunikasi, pergerakan di kelas dan sekolah, kegiatan sehari-hari seperti makan/minum/buang air/memakai baju-sepatu dan sebagainya.

Bagian ini juga mencakup apa saja bentuk penyesuaian pembelajaran dan penilaian yang diterapkan pada siswa. Misalnya: menempatkan siswa di barisan depan dan dekat dengan guru, memodifikasi kegiatan fisik (olahraga), memodifikasi materi pembelajaran dan penilaian, memberi tambahan waktu saat penilaian, memberikan tambahan pembelajaran, menyiapkan media/alat peraga dan sebagainya.

F. Informasi Kesehatan, Diagnosa dan Pengobatan/Penanganan

Bagian ini hanya diisi jika siswa telah ditangani oleh Dokter, Terapis, Audiologis, Spesialis Mata, atau mendapatkan penanganan medis lainnya. Hal ini mencakup informasi terkait diagnosa dan penanganan/pengobatan yang dijalankan, dan kondisi kesehatan lainnya seperti: epilepsi, jantung, asma, alergi, dsb. Dicantumkan juga bentuk dukungan yang diperlukan di sekolah terkait kondisi ini.

G. Informasi Lain

Bagian ini diisi dengan informasi terkait tantangan siswa yang belum disebutkan sebelumnya. Hal tersebut misalnya terkait capaian kurikulum, cara merawat diri, kondisi kehidupan sehari-hari di rumah, keterampilan sosial, dan sebagainya.

H. Kesimpulan Sementara

Di bagian ini, guru memberikan kesimpulan sementara mengenai dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa berdasarkan data/informasi yang diperoleh. Hal ini mencakup berbagai aspek di antaranya: jenis disabilitas siswa, alat bantu, akademik, pendampingan/bimbingan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

Adapun jenis disabilitas di bagian ini didasarkan pada pengelompokan dalam Dapodik yaitu: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita ringan, Tunagrahita sedang, Tunadaksa ringan, Tunadaksa sedang, Tunalaras, Tunawicara, Hiperaktif, Sulit Belajar, Down syndrome, Autis dan Tunaganda.

I. Program Pembelajaran Individual (PPI)

Program Pembelajaran Individu (PPI) ini hanya diperuntukkan untuk membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau memiliki standar di bawah kurikulum. PPI harus dirancang oleh guru secara jelas, detil dan memungkinkan untuk dilaksanakan, serta didiskusikan dengan orang tua, guru pendamping khusus dan kepala sekolah.

Bagian ini mencakup kebutuhan dan capaian siswa, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan dirancang secara spesifik, dapat diukur, realistis/dapat dicapai, dan memiliki jangka waktu pencapaian tertentu. Tujuan jangka panjang misalnya: siswa mampu menguasai braille, bahasa isyarat, dll. Adapun tujuan jangka pendek mencakup strategi/aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, kapan dicapai, siapa saja yang terlibat, evaluasi progress/capaian dan catatan.

CONTOH PROFIL BELAJAR SISWA (PBS) – BAGIAN A

A. Identifikasi Disabilitas							
Dibandingkan dengan siswa seusia, apakah memiliki kesulitan pada area berikut:			Tidak Kesulitan	Sedikit Kesulitan*	Banyak kesulitan*	Kesulitan Total*	*Berikanlah penjelasan singkat tentang gambaran kesulitan sesuai dengan hasil pengamatan atau pengetahuan guru.
NO	Kesulitan	PENJELASAN					
1	Penglihatan	Kesulitan melihat sesuatu pada jarak dekat atau jauh, luas pandang seperti objek benda, wajah dan gambar. <i>Jika siswa menggunakan kacamata, apakah siswa masih memiliki kesulitan untuk melihat?</i>					

Dibandingkan dengan siswa seusia, apakah memiliki kesulitan pada area berikut:			Tidak Kesulitan	Sedikit Kesulitan*	Banyak kesulitan*	Kesulitan Total*	*Berikanlah penjelasan singkat tentang gambaran kesulitan sesuai dengan hasil pengamatan atau pengetahuan guru.
2	Pendengaran	Kesulitan mendengarkan suara seperti suara orang, musik dan suara lainnya. <i>Jika siswa menggunakan alat bantu dengar, apakah siswa masih mengalami kesulitan untuk mendengar?</i>					
3	Motorik Kasar	Kesulitan berjalan atau melakukan aktivitas seperti naik tangga dan duduk					
4	Motorik Halus	Kesulitan menggunakan tangan dan jari-jari, seperti mengambil benda kecil, contoh tombol atau pensil, biji-bijian, atau buka tutup wadah/kotak atau botol					
5	Berbicara	Sulit dipahami saat berbicara, tidak mengeluarkan suara (hanya dipahami dalam bahasa yang sering digunakan oleh siswa)					
6	Intelektual	Kesulitan fungsi intelektual secara umum seperti					

Dibandingkan dengan siswa seusia, apakah memiliki kesulitan pada area berikut:			Tidak Kesulitan	Sedikit Kesulitan*	Banyak kesulitan*	Kesulitan Total*	*Berikanlah penjelasan singkat tentang gambaran kesulitan sesuai dengan hasil pengamatan atau pengetahuan guru.
		mengenali, mengingat, mengetahui, memahami, melakukan berbagai informasi atau instruksi di sekolah, di rumah, ketika bermain, dll					
7	Belajar Spesifik	Kesulitan dalam area tertentu berkaitan dengan membaca (disleksia), menulis (disgrafia), dan menghitung (diskalkulia). Meskipun sebenarnya siswa mampu belajar banyak hal di pelajaran lainnya.					
8	Perilaku/ Perhatian / Sosialisasi	Sulit mengontrol perilaku diri sendiri, dan/atau sulit fokus dan konsentrasi, dan/atau sulit menerima perubahan rutinitas, dan/atau kesulitan berteman.					
9	Emosi	Siswa terlihat: sangat sedih, depresi, cemas berlebihan dan/atau gelisah.	Tidak pernah	Jarang	Sering	Selalu	

Tabel Acuan Guru dalam Mengidentifikasi Disabilitas – Bagian A

Penjabaran dibawah merupakan acuan untuk membantu menentukan tingkat kesulitan disabilitas.

Kesulitan:	Gambaran Umum	Tidak ada kesulitan	Sedikit Kesulitan	Banyak Kesulitan	Kesulitan Total
Penglihatan	Kemampuan mata untuk melihat seperti wajah orang, objek, tulisan atau gambar di papan tulis atau buku. ini bukanlah kemampuan otak/berfikir untuk memahami apa yang dilihat. Catatan: penglihatan dalam hal ini mengacu pada kemampuan anak untuk melihat, bahkan ketika menggunakan kacamata/lensa kontak, jika memang saat ini anak menggunakannya.	Anak dapat melihat papan tulis, buku, benda termasuk yang berukuran kecil, ekspresi wajah, dll, dengan tingkat kemampuan yang sama seperti kebanyakan anak-anak lain pada usianya.	Anak memiliki kesulitan tetapi dapat diatasi dengan misalnya; duduk lebih dekat ke papan tulis, atau mendekatkan buku ke mata. Atau menggunakan kacamata/lensa dapat mengatasi kesulitan penglihatan anak.	Kesulitan penglihatan anak tidak dapat diatasi dengan menggunakan kacamata, namun anak masih memiliki sisa kemampuan penglihatan termasuk membedakan gelap dan terang, atau kacamata/lensa kontak dapat mengatasi kesulitan penglihatan anak, tapi anak tidak memiliki akses untuk mendapatkan kacamata.	Seorang anak dianggap buta ketika dalam jarak 6 meter dia tidak dapat melihat sebuah objek, dimana anak dengan penglihatan normal dapat melihat dalam jarak 60 meter, atau jika bidang bidang penglihatannya berdiameter kurang dari 20° (normal bidang penglihatan 180°).
Pendengaran	Kemampuan mendengar suara manusia atau musik. Catatan: pendengaran mengacu pada kemampuan anak untuk mendengar bahkan pada saat anak menggunakan alat bantu pendengaran, jika anak sedang menggunakannya.	anak mampu mendengar dengan tingkat kemampuan sama seperti anak lain seusianya.	Anak mungkin memiliki kesulitan mendengar pembicaraan yang halus atau jarak jauh. Mereka juga mengalami kesulitan mendengar percakapan normal dimana banyak suara latar.	Anak membutuhkan alat bantu dengan untuk memahami pembicaraan normal. Bahkan pada beberapa anak, mereka tidak dapat memahami pembicaraan normal walaupun sudah menggunakan alat bantu. Tanpa alat bantu dengar, anak akan membutuhkan ketergantungan pada membaca bibir dan Bahasa isyarat.	Anak-anak dengan gangguan pendengaran berat akan selalu mengalami kesulitan memahami percakapan dan tidak mendeteksi bahkan teriakan paling keras sekalipun tanpa alat bantu dengar. Banyak anak dengan gangguan pendengaran berat perlu menggunakan Bahasa isyarat.

Kesulitan:	Gambaran Umum	Tidak ada kesulitan	Sedikit Kesulitan	Banyak Kesulitan	Kesulitan Total
Motorik Kasar	Berjalan atau menaiki tangga Catatan: jika anak memiliki alat bantu untuk bergerak seperti kursi roda, kruk atau alat bantu jalan/gerak, atau dibantu untuk bergerak. Pertanyaan ini menanyakan kemampuan anak untuk berjalan atau menaiki tangga bahkan ketika menggunakan alat bantu atau dibantu dalam bergerak	Dapat berjalan sendiri tanpa dibantu sejauh lebih dari 500 meter, baik di dalam maupun luar ruangan.	Dapat berjalan sendiri (dengan kruk atau alat bantu jalan jika dibutuhkan) sejauh 100 meter di dalam atau luar ruangan; mampu menaiki tangga dengan rel tangga atau sedikit/minim bantuan. atau memiliki sedikit kesulitan untuk bergerak antara duduk dan berdiri.	Memiliki kesulitan berjalan meskipun menggunakan kruk atau alat bantu jalan; membutuhkan bantuan untuk menaiki tangga, atau tidak mampu menaiki tangga. atau, membutuhkan kursi roda dan dapat menggunakan secara mandiri. Atau, memiliki banyak kesulitan untuk bergerak antara duduk dan berdiri, namun dapat dilakukan secara mandiri.	Anak memiliki kesulitan untuk mengontrol gerakan (disengaja). Tidak dapat duduk, berdiri atau berjalan secara mandiri walaupun menggunakan alat bantu bergerak. tidak dapat mendorong/menggunakan kursi roda sendiri.
Motorik Halus	Menggunakan tangan dan jari-jari untuk pekerjaan/tugas yang membutuhkan ketelitian, seperti menulis, menggambar, memegang pensil, mengambil koin atau benda kecil lainnya atau mengancingkan baju.	Tidak ada kesulitan atau sama jika dibandingkan dengan anak seusianya.	Sedikit kesulitan dalam menggenggam, memegang, atau menggunakan benda-benda kecil (seperti biji kacang hujau, manik) dengan tangan atau jari-jari, tapi dapat dilakukan secara mandiri.	Banyak mengalami kesulitan dalam menggenggam, memegang, atau menggunakan benda kecil seperti biji kacang hujau, manik) dengan tangan atau jari-jari; sebagai contoh memegang atau memegang pensil dengan benar, sendok, mengancing baju atau menarik risleting. Anak mungkin membutuhkan pendampingan atau alat bantu khusus untuk menggenggam benda.	Anak pada dasarnya tidak dapat menggunakan tangan dan jari-jarinya untuk melakukan gerakan motorik halus. Anak membutuhkan pendamping atau alat bantu khusus untuk mendampingi saat makan atau gerakan motorik khusus lainnya.
Berbicara	Dipahami ketika berbicara dengan bahasa yang paling sering	Dapat berbicara dan dimengerti dengan jelas.	Kesulitan ringan dalam berbicara atau dimengerti saat	Sangat sulit dimengerti, atau sedikit berbicara, sering sekali	Tidak berbicara sama sekali (bisu). jika anak menggunakan Bahasa isyarat tetapi

Kesulitan:	Gambaran Umum	Tidak ada kesulitan	Sedikit Kesulitan	Banyak Kesulitan	Kesulitan Total
	digunakan/lazim (disukai) bagi anak.		berbicara; dapat mencakup gagap ringan (gangguan aliran bicara, perpanjangan bunyi atau kata-kata).	menghindari berbicara. Atau kelihatan berusaha terlalu keras untuk mengeluarkan kata-kata. atau menggunakan kalimat sederhana (kurang dari 4 kata). atau salah dalam mengurutkan kata dalam sebuah kalimat, atau memiliki kosa kata yang terbatas dibanding anak yang lain atau memiliki gagap yang signifikan.	tidak berbicara, ini adalah katagori yang tepat untuk dipilih. (harap dicatat, menggunakan bahasa isyarat di dalam kolom komentar)
Intelektual	<p>Kesulitan fungsi intelektual secara umum seperti memahami, mengingat berbagai informasi atau instruksi di sekolah, ketika bermain, di rumah, dll</p> <p>Penting untuk membandingkan dengan anak pada usia yang sama yang tidak memiliki kesulitan.</p>	<p>Mampu belajar dan menerapkan keterampilan sekolah dan keterampilan umum yang dibutuhkan di rumah, pada level yang sama (atau di atas) seperti anak lain pada usianya.</p> <p>Jika anak tampak mengalami kesulitan belajar karena disebabkan anak tidak paham Bahasa Indonesia, hal ini bukan disebabkan karena ketidakmampuan/disabilitas dalam pembelajaran.</p>	Dibandingkan dengan anak lain di dalam kelas, anak membutuhkan beberapa bantuan dan/atau tambahan waktu namun dapat dilakukan secara mandiri.	Dibandingkan dengan anak lain di usia yang sama, anak memiliki banyak kesulitan terkait belajar, keterampilan akademik dan konsep atau, kesulitan memahami beberapa instruksi/langkah dalam suatu tugas; atau belajar untuk melakukan tugas sederhana seperti mengeluarkan isi tas sekolah, meletakkan buku-buku dan pensil di meja, mengerjakan tugas, tanggung jawab rumah termasuk mengurus diri sendiri (buang air, berpakaian, makan).	Dibandingkan dengan anak lainnya di kelas, anak tidak dapat mendemonstrasikan fungsi intelektual dalam belajar, menerapkan hasil belajar, berfikir, pemecahan masalah, tidak dapat menolong dan merawat diri sendiri dan mengambil keputusan.

Kesulitan:	Gambaran Umum	Tidak ada kesulitan	Sedikit Kesulitan	Banyak Kesulitan	Kesulitan Total
Kesulitan Belajar Spesifik	<p>Dibandingkan dengan anak yang se -usia, anak memiliki kesulitan pada area tertentu meliputi area membaca, berhitung, memahami, menulis (seperti disleksia, diskalkulia). Kesulitan belajar spesifik seperti disleksia mempengaruhi beberapa aspek dalam belajar. Anak-anak ini sering belajar keterampilan lain dengan sangat baik.</p> <p>Tidak untuk kelas awal atau anak yang baru masuk sekolah.</p>	Tidak ada kesulitan dalam membaca, menulis, memahami, dan berhitung.	Sedikit kesulitan dalam membaca, menulis, memahami dan berhitung. Namun anak memperlihatkan perkembangan pada area-area tersebut.	<p>Anak beresiko, atau telah didiagnosa disleksia (atau kesulitan belajar spesifik lainnya)</p> <p>Anak memperlihatkan dengan jelas kemampuan pada beberapa area, namun juga memperlihatkan kelemahan pada area lain seperti; tulisan tangan yang buruk dengan banyak kesalahan, mengulangi kata-kata; mengeja kata dengan cara yang berbeda; tidak ada ekspresi dalam membaca; pemahaman yang buruk; tidak mengenali kata-kata yang familiar; lamban dalam mengolah informasi; konsentrasi yang buruk; kelelahan karena berusaha keras untuk berkonsentrasi; kesulitan mengikuti instruksi.</p>	
Perilaku/ perhatian/ sosialisasi	Kesulitan mengontrol perilaku; dan/atau fokus dan konsentrasi dan/atau menerima perubahan rutinitas.	Berperilaku dan bersosialisasi sesuai dengan usianya. Mampu mengikuti instruksi, dan memberikan respon sesuai instruksi/perintah.	sulit melakukan kontak mata dengan guru. atau, membutuhkan waktu lebih untuk menyesuaikan dengan perubahan rutinitas. Dibandingkan dengan anak lain yang seusia, mungkin anak menunjukkan sedikit/kurang	Membutuhkan pendampingan orang dewasa dalam beberapa perilaku dan kegiatan sosial, namun beberapa dapat dilakukan sendiri. Memiliki kesulitan dalam hubungan pertemanan dan interpersonal; kesulitan bertahan dalam mengerjakan	Sering membutuhkan pendampingan orang dewasa. dapat menampilkan perilaku seperti: Perilaku repetitive (berulang-ulang) seperti bergoyang, mengambai atau mengepak; sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas; terobsesi pada topik pembicaraan tertentu; tidak dapat memperbaiki pertemanan; terpaku pada pengalaman sensorik tertentu,

Kesulitan:	Gambaran Umum	Tidak ada kesulitan	Sedikit Kesulitan	Banyak Kesulitan	Kesulitan Total
			perilaku agresif, destruktif, atau melukai diri, marah, tidak mampu menangani kegagalan, menjadi pengganggu atau penentang (tidak ramah dan tidak dapat bekerjasama).	tugas; sangat bergantung pada rutinitas; Rentan perhatian yang rendah; impulsif dan hiperaktif; kurang memperhatikan detail; kesulitan mengatur tugas atau mengikuti instruksi; sering kehilangan buku, pekerjaan rumah, mainan, barang lainnya; berbicara berlebihan, gelisah atau ketidakmampuan untuk tetap duduk dalam situasi yang tepat. Dibandingkan dengan anak lain seusia, mungkin secara moderat/cukup anak menunjukkan perilaku agresif, destruktif, atau melukai diri, marah, tidak mampu menangani frustrasi, menjadi pengganggu atau penentang (tidak ramah dan tidak kooperatif).	misalnya. lampu atau tekstur.
Emosi	Seberapa sering anak terlihat: sangat sedih dan depresi, dan/atau terlalu cemas dan marah	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
		Anak hampir tidak pernah tampak sangat sedih dan depresi, dan/atau terlalu cemas. Kadang-kadang terlihat, tapi sangat jarang.	Anak tampak sangat sedih dan depresi, dan/atau terlalu cemas sekitar sebulan sekali. <u>Sedikit lebih</u> dari rata-rata anak seusia.	Anak tampak sangat sedih dan depresi, dan/atau terlalu cemas sekitar seminggu sekali.	Anak tampak sangat sedih dan depresi, dan/atau terlalu cemas sekitar setiap hari sekali.
Gambaran Bentuk-bentuk emosi	Gejala-gejala depresi bisa termasuk: <i>suasana hati yang sedih atau mudah marah yang terus menerus; kehilangan minat atau kesenangan; sering samar-samar atau mengalami keluhan / penyakit fisik yang tidak spesifik; kelelahan atau kekurangan energi;</i>				

Kesulitan:	Gambaran Umum	Tidak ada kesulitan	Sedikit Kesulitan	Banyak Kesulitan	Kesulitan Total
	<p><i>tidak bisa tidur, atau tidur berlebihan; pikiran berulang tentang kematian atau bunuh diri; perasaan tidak berharga atau rasa bersalah.</i></p> <p><i>Gejala kecemasan / kekhawatiran bisa termasuk: kekhawatiran yang terus-menerus, berlebihan, dan tidak realistis, tidak mampu fokus pada objek atau situasi tertentu; ketidakmampuan mengendalikan kecemasan (kesulitan menghilangkan kekhawatiran); sering mencari kepastian dari orang lain; perfeksionis dan kritis terhadap diri sendiri; kegelisahan, merasa "gelisah"; kesulitan berkonsentrasi; kesulitan tidur atau kesulitan untuk bisa tetap tertidur.</i></p>				

ADAPTASI PROFIL BELAJAR SISWA

SEKOLAH DASAR INPRES WUDU - NAGEKEO

SD Inpres Wudu adalah sekolah yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekolah ini telah mengadopsi dan mengadaptasi Profil Belajar Siswa (PBS) berdasarkan kebutuhan lokal dan menerapkan instrumen tersebut pada semua siswa tanpa terkecuali. Instrumen yang dikembangkan oleh SDI Wudu mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

I. Aspek Bahasa

Di bagian ini, seluruh siswa diidentifikasi berdasarkan: Bahasa yang digunakan sehari-hari, Kelancaran berbicara, Pengenalan simbol dan artinya (huruf, suku kata dan kata), Kemampuan literasi, dan Kemampuan numerasi.

II. Lingkungan Rumah

Di bagian ini, seluruh siswa diidentifikasi berdasarkan kondisi tempat tinggalnya yang mencakup: Jarak dari rumah ke sekolah, Pekerjaan di rumah (menjaga adik, mengambil air, memelihara ternak dsb), dan akses pada sumber air.

III. Kesehatan Anak

Di bagian ini, seluruh siswa diidentifikasi berdasarkan kesulitan fungsional sebagaimana tercantum dalam PBS yaitu: Penglihatan, Pendengaran, Motorik Kasar, Motorik Halus, Berbicara, Intelektual, Belajar Spesifik, Perilaku/Perhatian/Sosialisasi, dan Emosi.

IV. *Stunting*

Berdasarkan konsultasi dengan puskesmas, seluruh siswa diidentifikasi apakah mengalami *stunting* atau tidak. *Stunting* dipahami sebagai masalah kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan tumbuh kembang anak terhambat sehingga tinggi badannya lebih rendah dari standar usianya.

V. Penyakit

Seluruh siswa diidentifikasi apakah mengalami penyakit seperti: Malaria, Cacingan, dan Lainnya.

CONTOH ADAPTASI PROFIL BELAJAR SISWA

SEKOLAH DASAR INPRES WUDU - NAGEKEO

KELAS : IV.a

1. Bahasa

NO	NAMA SISWA	JUMLAH SISWA			INFORMASI & DATA TENTANG ANAK																	
					1.1 Bahasa sehari hari			1.2 Anak berbicara			1.3 Anak mengenal simbol dan mengerti artinya				1.4 Anak membaca				1.5 Menghafal perkalian			
		L	P	JLH	Bahasa Ibu	Bahasa Indonesia saja	Bahasa Ibu & Indonesia	Lancar	Tidak Lancar	Sangat Tidak Lancar	Belum kenal huruf	Kenal huruf	Kenal suku kata	Kenal kata	Lancar	Lamban	Sangat lamban	Belum bisa	Lancar	Lamban	Sangat lamban	Belum bisa
1		√			√				√					√		√				√		
2			√				√	√						√	√				√			
3		√			√			√						√		√				√		
4			√				√	√						√	√				√			
5		√			√				√					√		√				√		
6		√			√				√					√	√					√		
7		√					√	√						√		√			√			
8			√			√		√						√	√				√			
9			√			√		√						√	√				√			
10		√			√				√					√	√				√			
11			√		√			√						√	√				√			
12			√		√				√					√		√			√			
13			√			√		√						√	√				√			
14			√		√			√						√	√				√			
15			√		√				√					√		√			√			
16			√		√				√					√	√				√			
17		√					√	√						√		√				√		
18		√			√				√					√	√					√		
19		√			√				√					√	√				√			
20		√					√	√						√		√				√		
Jumlah		10	10	20	12	3	5	11	9					20	12	8			13	7		